



POLICY BRIEF

KAJIAN NISAB ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA 2026

FEBRUARI 2026

**DIREKTORAT KAJIAN DAN PENGEMBANGAN
ZIS DSKL NASIONAL
BAZNAS RI**



Tim Penyusun

Pengarah:

Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA

H. Mokhamad Mahdum SE, MIDEc, Ph.D., Ak, CA, CPA, CWM, CGRCOP, GRCE, CHRP

Ir. H. Muhamad Nadratuzzaman Hosen, MS., M.Ec., Ph.D

Prof. (HC). Dr. Zainulbahar Noor, S.E., M.Ec

Saidah Sakwan, MA

Dr. H. Rizaludin Kurniawan, S.Ag, M.Si., CFRM

Kolonel CAJ (Purn) Drs. Nur Chamdani

KH. Achmad Sudrajat, Lc, M.A

Penulis:

Muhammad Hasbi Zaenal, Lc, MA, Ph.D

Aisha Putrina Sari M.S.M

Hidayaneu Farchatunnisa, ME

Dita Anggraini, SE

Tri Alfiani, MIFP

Rifdah Nanda Pridayani, SE

Indah Hurun Hayana, SE

Devon Ramadhan Delian., B.Comm.

Penerbit:

Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)

Gedung Kebangkitan Zakat Jl. Matraman Raya No 134 Jakarta

Phone Fax +6221 3913777 Mobile +62812-8229-4237

Email: dkpn@baznas.go.id ; www.baznas.go.id; www.puskasbaznas.com

Kajian Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa 2026

A. PENDAHULUAN

Rukun Islam ketiga yang memiliki peran penting dalam filantropi Islam adalah zakat. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syaratnya dan disalurkan kepada orang-orang yang telah ditentukan yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana," (QS. At-Taubah: 60).

Pada ayat tersebut dijelaskan secara rinci terkait orang yang berhak menerima zakat. Namun, untuk sumber zakat yang diperoleh itu sendiri dapat berasal dari sumber yang beragam seperti zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan perak, harta terpendam, zakat pendapatan dan jasa, zakat perusahaan dan lain-lain.

Kewajiban mengeluarkan zakat tidak dapat digantikan dengan ibadah *mahdah* lainnya. Zakat memiliki kedudukan yang penting dan fundamental dalam Islam. Dalam perkembangannya, persoalan zakat bukan saja berkisar pada dimensi *mahdah*, melainkan juga mengalami perluasan pada dimensi sosial dan ekonomi.

Dilihat dari dimensi sosial, zakat dapat menumbuhkan soliditas, kebersamaan, dan ukhuwah. Zakat juga dapat menumbuhkan perasaan saling mencintai antar sesama. Selain itu, dengan berzakat, manusia akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, keamanan dan kesejahteraan hidup, seperti yang tercantum pada ayat Al-Qur'an di bawah ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui," (QS. At-Taubah: 103).

Pada dimensi ekonomi, zakat memiliki fungsi strategis sebagai instrumen distribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, peran zakat semakin relevan seiring dengan besarnya jumlah penduduk muslim yang pada tahun 2026 diperkirakan telah melampaui 220 juta jiwa. Kondisi ini menjadikan Indonesia memiliki basis muzaki yang sangat luas dan berpotensi mendukung pembiayaan pembangunan sosial secara berkelanjutan.

Perkembangan struktur ekonomi nasional menunjukkan pergeseran yang signifikan dari sektor pertanian menuju sektor jasa, industri, dan profesi modern. Perubahan ini berimplikasi langsung terhadap komposisi sumber zakat. Berbagai kajian mutakhir mengestimasi bahwa potensi zakat nasional mencapai 327 triliun rupiah per tahun. Potensi tersebut terutama bersumber dari zakat pendapatan dan jasa, zakat perusahaan, serta aktivitas ekonomi pada sektor industri dan jasa. Kontribusi zakat dari sektor pertanian dan peternakan relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan sektor ekonomi modern yang saat ini menjadi tulang punggung pendapatan masyarakat.

Besarnya potensi zakat tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki kapasitas yang signifikan untuk berperan sebagai instrumen kebijakan sosial dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat nasional hingga saat ini masih berada jauh dibawah potensi yang tersedia. Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini mengindikasikan belum optimalnya tata kelola zakat, baik dari aspek regulasi, standarisasi penghitungan, maupun keseragaman pemahaman fiqh terkait objek dan nisab zakat, khususnya zakat pendapatan dan jasa.

Dalam struktur ekonomi yang semakin bertumpu pada pendapatan rutin dan aktivitas jasa, zakat pendapatan dan jasa memiliki posisi strategis dalam upaya optimalisasi potensi zakat nasional. Pendekatan penghitungan zakat yang masih bertumpu pada standar emas dinilai kurang responsif terhadap dinamika ekonomi kontemporer dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan zakat pendapatan dan jasa yang berbasis maqashid syariah agar kewajiban zakat dikenakan secara adil kepada kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi, sekaligus memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen kebijakan publik dalam perlindungan sosial dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

B. ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA

Dalam dunia modern, sumber rezeki sangat dinamis dan kompleks. Jika dibandingkan dengan zaman dahulu, berbagai cara untuk mencari penghasilan jauh lebih beragam. Bahkan peluang untuk menjadi kaya lebih terbuka jika dibandingkan dengan cara terdahulu. Dalam mayoritas kasus, cara-cara modern untuk mencari penghasilan jauh lebih beragam jika dibandingkan dengan cara-cara tradisional. Kaitannya dengan zakat,

secara prinsip, zakat dikenakan kepada golongan kaya dan diberikan kepada golongan yang miskin. Oleh karena itu, jika zakat dikenakan kepada petani yang dalam konteks kehidupan modern termasuk golongan miskin maka semestinya zakat juga harus dikenakan kepada seorang dokter, insinyur, pengacara dan beragam profesi modern lainnya. Sebab golongan ini justru tergolong dalam kelompok golongan kaya. Kekayaan yang didapat oleh tenaga profesional di zaman modern ini lebih besar dibandingkan dengan petani dan peternak yang bahkan ketentuan zakatnya sudah diatur secara jelas.

Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Dalam hal ini, salah satu prinsip dari zakat yaitu pemerataan pendapatan dan penyaluran kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin, seperti yang tercantum pada ayat Al-Qur'an di bawah ini:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian," (QS. Adz-Dzariyat: 19).

Jika zakat saja diwajibkan kepada para petani dan peternak yang mayoritas termasuk golongan miskin maka seharusnya zakat juga diwajibkan kepada golongan kaya yang mayoritas berprofesi sebagai tenaga profesional dan pekerja yang memiliki gaji/penghasilan bulanan. Maqasid mengajarkan bahwa zakat dikenakan kepada orang kaya dan dibagikan kepada orang miskin. Jadi, tentu tidak adil jika golongan ini tidak diwajibkan untuk membayar zakat atas penghasilannya.

Dalam konsep harta objek zakat atau al amwal az zakawiyyah, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan: pendekatan tafsili (terurai) dan pendekatan ijmal (global). Pendekatan terurai yaitu objek zakatnya secara jelas dijabarkan sesuai dengan sumber hartanya seperti zakat emas-perak (QS. At-Taubah: 34-35), zakat pertanian (QS. Al-An'am: 141), zakat peternakan, zakat perdagangan, dan zakat hasil temuan/ rikaz.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَكْتُمُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٣٤ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي
نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada

hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu," (QS. At-Taubah: 34-35).

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan,” (QS. Al-An’am: 141).

Sedangkan dilihat dari pendekatan global, selama objek zakatnya memenuhi syarat dan merupakan harta (QS. At-Taubah: 103) serta diperoleh dari hasil usaha yang baik dan halal (QS. Al-Baqarah: 267) maka wajib dikeluarkan zakatnya setiap menerima penghasilan.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui,” (QS. At-Taubah: 103).

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa,” (QS. Al-Baqarah: 276).

Pengertian Zakat Pendapatan dan Jasa

Zakat Pendapatan dan Jasa adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan yang diperoleh oleh seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan yang ia usahakan, secara sendiri maupun secara bersama-sama. Dalam terminologi bahasa Arab, biasa disebut dengan *raatib* pluralnya *rawaatib*. Sedangkan menurut kamus *al-Wasit*, gaji atau pendapatan ini disebut dengan *raatib* yaitu harus bersifat kontinyu dan tetap. Selain gaji, terdapat istilah komisi atau *fee* yang termasuk kategori pendapatan atau penghasilan.

Jika gaji bersifat tetap dan kontinyu, komisi atau *fee* merupakan imbalan atas pekerjaan bebas yang bersifat temporer.

Dalam terminologi klasik, jenis imbalan seperti ini disebut dengan *u'ittiyat*. Dalam perkembangannya, para pekerja dan pemilik keahlian ini justru memperoleh upah atau pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bertani, beternak atau berdagang. Oleh karena itu, sangat tepat jika zakat diwajibkan kepada para pekerja yang mendapat upah dan gaji sebagaimana diwajibkan kepada petani dan pedagang. Dalam QS. Al-Baqarah: 267, Allah SWT mengisyaratkan bahwa zakat dikenakan kepada apa yang diusahakan (*Al-kasbu*).

Sejarah dan Dasar Penetapan Zakat Pendapatan dan Jasa

Dasar dalam penetapan zakat pendapatan dan jasa juga dapat dilihat dari sejarah dari zaman nabi dan para sahabat serta para *tabi'in*. Setelah penaklukan kota Makkah, Rasulullah SAW menetapkan kepada „Uttab bin Asid ra yang kala itu menjadi Gubernur Makkah, untuk menyisihkan sebanyak dua dirham setiap hari ke *baitul maal*.⁷ Utsman bin Affan ra juga menetapkan zakat atas setiap upah atau gaji yang diberikan kepada pegawainya selama sampai pada nishab.

Selanjutnya, Mu'awiyah bin Abi Sofyan ra ketika menjadi khalifah juga menetapkan zakat atas tiap-tiap upah/*u'tiyat*. Pada masa tersebut, sejumlah sahabat nabi yang masih hidup tidak mengingkari kebijakan Mu'awiyah ra tersebut, yang berarti mereka menyetujui kebijakan untuk mengenakan zakat pendapatan dan jasa secara rutin. Sementara Umar bin Abd al-Aziz selalu mengambil zakat setiap kali menggaji pegawainya. Beliau juga mengambil zakat dari harta-harta yang pernah disita pemerintah yang dikembalikan kepada pemiliknya. Bahkan ia juga mengambil zakat dari setiap komisi yang ia berikan kepada seseorang. Ibnu Abbas ra menanggapi seseorang ketika mendapatkan manfaat harta dari pekerjaannya dengan mengatakan bahwa “hendaknya orang tersebut mengeluarkan zakatnya pada hari ia mendapatkannya.

Dalam Kitab al-Amwal, Hubairah bin Barim juga pernah berkata bahwa Ibnu Mas'ud ra pernah memberikannya upah dalam kantong-kantong kecil berisi uang, kemudian mengambil zakat darinya.

كان ابن مسعود يزكي أعطياتهم من كل ألف خمسة وعشرين

Artinya: “Ia menambahkan bahwa Ibnu Mas'ud mengeluarkan zakat dari penghasilan mereka sebesar 25 dari setiap 1000.”

Ini berarti zakat dikenakan dengan kadar sebesar 2,5 persen pada saat seseorang menerima penghasilannya. Hal ini juga berarti bahwa tidak mungkin para sahabat nabi

menetapkan kewajiban zakat yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa negara Islam yang menetapkan ketentuan terkait zakat pendapatan dan jasa. Salah satu negara yang menetapkan hal tersebut adalah Saudi Arabia. Kerajaan Saudi Arabia (KSA) mewajibkan zakat atas segala jenis penghasilan, baik berupa laba atau pendapatan, baik secara perseorangan ataupun syarikat, baik perdagangan, perusahaan maupun kerja perseorangan. Dewan Kajian dan Fatwa KSA, fatwa no 282, tanggal 11/11/1392 menyatakan wajib zakat atas seseorang yang memiliki uang yang sudah mencapai nishab, seperti seorang pegawai yang mendapatkan gaji bulanan.

Ketentuan mengenai wajib zakat atas gaji dan penghasilan, keuntungan dari pekerjaan dan seluruh pendapatan ini telah ditetapkan dalam Mukhtamar Internasional I tentang Zakat di Kuwait, pada tanggal 29 Rajab 1404/ 30 April 1984 dan dalam Sidang Komisi Fatwa MUI di Padangpanjang pada bulan Januari 2009.¹⁵ Selain itu, pemerintah Republik Indonesia juga telah menetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 ayat 2 huruf h bahwa zakat pendapatan dan jasa adalah salah satu sumber zakat yang wajib dibayarkan. Walaupun ada perbedaan pendekatan dalam penghitungan zakat pendapatan dan jasa di berbagai negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim, maka dapat diberlakukan kaidah *fiqh* sebagai berikut:

اعْلَمُ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْاجْتِهَادِ رَفْعُ الْخِلَافِ وَيَرْجَعُ الْمَخَالَيفُ عَنْ مَذْهَبِهِ لِمَذْهَبِ الْحَاكِمِ

Artinya: “Ketahuilah bahwa keputusan/kebijakan seorang pemimpin/penguasa dalam pelbagai persoalan ijtihad menutup pintu ikhtilaf (perbedaan pendapat).”

Karena itu, dalam konteks Indonesia, keputusan dan ketetapan pemerintah terkait zakat pendapatan dan jasa ini seharusnya dapat menghilangkan perbedaan pendapat. Untuk ketentuan dan tata cara penghitungan zakat pendapatan dan jasa di Indonesia sendiri, telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syariat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

C. NISAB ZAKAT PENDAPATAN DAN JASA

1. Pengelolaan Zakat di Indonesia

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang dibentuk langsung melalui Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional di Indonesia. BAZNAS memiliki mandat untuk melakukan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat agar tepat sasaran dan berdampak bagi kesejahteraan umat.

Secara kelembagaan, BAZNAS dengan seluruh jaringannya yang meliputi BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten, BAZNAS Kota dan LAZ berjumlah 760 Lembaga. Banyaknya kelembagaan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki sistem pengelolaan zakat yang terorganisir secara nasional hingga tingkat daerah.

Penguatan tata kelola ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk: (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Artinya, zakat tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembangunan sosial dan ekonomi nasional.

Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia serta jaringan kelembagaan zakat yang masif dan formal hingga ke level kabupaten/kota, Indonesia menjadi satu-satunya negara dengan sistem pengelolaan zakat yang terintegrasi secara nasional dalam skala sebesar ini. Besarnya potensi dan kompleksitas tata kelola tersebut menuntut adanya kebijakan dan regulasi yang kuat agar pengelolaan zakat berjalan profesional, transparan, akuntabel, serta mampu berkontribusi signifikan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa berdasarkan PMA No 52 Tahun 2014 dan PMA No 31 Tahun 2019

Zakat Pendapatan dan Jasa merupakan salah satu jenis zakat yang diamanahkan oleh UU No 23 Tahun 2011. Secara peraturan yang ada, Nisab atau batas minimum seseorang terkena kewajiban zakat Pendapatan dan Jasa termuat dalam aturan turunan yakni PMA No 52 Tahun 2014 dan PMA No 31 Tahun 2019.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama telah menetapkan landasan konstitusional mengenai tata cara penghitungan zakat pendapatan dan jasa atau penghasilan sebagaimana diatur secara rinci dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014. Dalam regulasi tersebut, ditetapkan sebuah pendekatan hukum yang disebut sebagai *qiyas syabah*, yakni metode analogi hukum yang mengintegrasikan karakteristik dua jenis zakat berbeda ke dalam satu model penghitungan. Melalui pendekatan ini, batas minimal atau *nishab* zakat pendapatan dan jasa dianalogikan dengan zakat pertanian yang sebesar lima *ausaq*, sedangkan besaran kadar zakat yang wajib ditunaikan sebesar 2,5% diselaraskan dengan analogi pada zakat emas dan perak.

Adapun landasan syariah yang mendasari penggunaan *qiyas* zakat pertanian tersebut bersumber dari tekstual Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 267, di mana terminologi

al-kasb dipahami secara mendalam sebagai pendapatan yang diperoleh melalui aktivitas kerja secara langsung. Dalam pandangan ulama kontemporer seperti Shahatah, penggunaan istilah *al-kasb* yang disandingkan dengan frasa "*apa yang Kami keluarkan dari bumi*" membuka ruang ijtihad yang luas untuk menyetarakan sektor pendapatan dan jasa pada masa kini dengan hasil pertanian pada masa Rasulullah SAW. Hal ini diperkuat oleh adanya kesamaan struktur ekonomi yang dominan; jika pada masa kenabian sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian, maka dalam konteks ekonomi modern, sektor jasa dan pendapatan berbasis kerja memegang peran yang serupa sehingga pendapatan yang bersumber murni dari hasil kerja dinilai memiliki kesamaan substansial dengan hasil bumi.

Kesamaan karakteristik dengan sektor pertanian ini kemudian berimplikasi pada waktu penunaianya, di mana zakat pendapatan dan jasa tidak lagi mensyaratkan terpenuhinya masa kepemilikan satu tahun atau *haul*. Sebaliknya, zakat tersebut wajib ditunaikan secara seketika pada saat penghasilan diterima, merujuk pada prinsip dalam Surah Al-An'am ayat 141 yang menegaskan kewajiban menunaikan hak atas hasil pada waktu diperolehnya atau saat "panen" tiba. Guna memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap tata kelola syariah, proses pembayaran zakat pendapatan dan jasa ini diinstruksikan untuk dilaksanakan melalui lembaga amil zakat resmi yang telah diakui dan diawasi oleh negara.

Namun, dalam perkembangan selanjutnya terbit PMA Nomor 31 Tahun 2019 sebagai Perubahan Kedua atas PMA Nomor 52 Tahun 2014. Melalui peraturan terbaru yang berlaku sejak November 2019 ini, Kementerian Agama mengubah nishab zakat pendapatan dan jasa yang semula berdasarkan standar harga pangan (beras/gabah) menjadi standar emas (senilai 85 gram emas).

D. PERBANDINGAN HARGA EMAS DAN HARGA PANGAN

Saat ini harga emas global menunjukkan tren kenaikan yang sangat tinggi. Harga emas naik sekitar 70 sampai 72 persen pada Januari 2026 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Tren ini mencerminkan perubahan fungsi emas dalam ekonomi global, yang sudah menjadi komoditas dan bukan lagi mencerminkan harga riil di lapangan. Harga emas saat ini juga sangat kuat dipengaruhi oleh dinamika pasar global, kebijakan moneter, ketidakpastian geopolitik, dan perilaku spekulatif pelaku pasar.

1. Tren Harga Emas

Emas telah menempati posisi sentral dalam peradaban manusia sejak zaman Rasulullah yaitu berfungsi sebagai alat tukar utama (*medium of exchange*), simbol

kekayaan, sekaligus instrumen investasi yang diakui. Dalam sejarah Islam, logam mulia ini mewakili fondasi sistem ekonomi berbasis nilai tukar yang adil dan transparan.

Sejak tahun 2002, harga emas global memasuki tren *bullish* jangka panjang dan telah mengalami peningkatan yang stabil dan signifikan. Data historis menunjukkan bahwa nilai emas telah melonjak hingga lebih dari dua kali lipat dibandingkan satu dekade sebelumnya. Rata-rata kenaikan tahunan dalam dekade terakhir ini mencapai sekitar 6,2% (Sholiha & Dewi, 2024), sebuah indikasi kuat terhadap kepercayaan pasar terhadap aset emas. Peristiwa-peristiwa ekonomi besar telah secara substansial membentuk pergerakan harga emas, menjadikannya aset yang sangat sensitif terhadap dinamika global.

Titik balik signifikan terjadi pada periode krisis keuangan global dari tahun 2008 hingga 2012, di mana harga emas melesat tinggi karena fungsinya sebagai aset *safe haven*. Pada masa ketidakpastian mendalam tersebut, investor berbondong-bondong mengalihkan modal mereka ke emas guna melindungi nilai investasinya. Puncaknya pada tahun 2012, harga emas mencapai level tertinggi yang merefleksikan tingkat ketidakpastian sistem keuangan global yang ekstrem (Beckmann & Czudaj, 2013). Pasca periode itu, harga emas sempat memasuki fase konsolidasi dari 2013 hingga 2018, bergerak dalam kisaran yang lebih stabil namun tetap mempertahankan nilai di atas level historis pra-2012 (Sholiha & Dewi, 2024). Namun, ketidakpastian yang disebabkan oleh isu-isu global dan pecahnya Pandemi COVID-19 kembali mendongkrak harga emas, bahkan mencatatkan rekor tertinggi sebesar USD 2.067 per ons troy pada Agustus 2020 (Chiang, 2022). Lonjakan ini secara gamblang menunjukkan bagaimana konflik antara faktor-faktor ekonomi dan geopolitik terus mendorong harga emas. Tren harga emas pasca-2022 menunjukkan penguatan yang lebih lanjut dan signifikan, melampaui batas psikologis baru, sebuah bukti bahwa emas tetap menjadi lindung nilai yang tangguh terhadap inflasi dan ketidakpastian (Marits & Herlina, 2025).

Kenaikan harga emas yang berkelanjutan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor makroekonomi utama. Emas secara tradisional dipandang sebagai pelindung nilai (*hedge*) terhadap inflasi. Studi menunjukkan bahwa saat inflasi meningkat, permintaan terhadap emas cenderung meningkat, karena pasar yakin bahwa emas mampu mempertahankan daya beli nilainya (Beckmann & Czudaj, 2013; Afham et al., 2017; Aye et al., 2016). Selain itu, suku bunga juga memainkan peran kunci ketika bank sentral menetapkan suku bunga rendah, emas menjadi investasi yang jauh lebih menarik karena biaya peluang (*opportunity cost*) untuk memegang aset non-bunga menjadi rendah. Terakhir, ketidakpastian politik dan ekonomi global seringkali menjadi katalis bagi masyarakat dan institusi untuk memilih emas sebagai instrumen investasi paling aman. Dalam konteks ini, emas bukan hanya dipandang sebagai simbol kekayaan, melainkan sebagai instrumen yang stabil dan mampu beradaptasi dengan dinamika global (Bampinas & Panagiotidis, 2015).

Lebih jauh dari sekadar instrumen investasi, dalam Islam emas merupakan salah satu standar nisab zakat misalnya untuk zakat perdagangan maupun pendapatan. Ketetapan bahwa nisab zakat emas adalah 85 gram mencerminkan peran vital emas dalam perspektif ekonomi syariah. Kepemilikan emas sebagai aset yang bernilai tinggi membawa pertanggungjawaban sosial yang mendorong redistribusi kekayaan dan keadilan ekonomi (Gülseven & Ekici, 2020). Pemahaman historis dan fikih ini semakin mengukuhkan posisi emas sebagai komoditas yang berfungsi bukan hanya sebagai alat investasi, tetapi juga sebagai instrumen utama keadilan sosial dalam masyarakat Muslim.

Analisis tren harga emas dalam dua dekade terakhir dengan jelas menunjukkan bahwa emas adalah aset yang masih menjadi andalan masyarakat dalam berinvestasi, namun dengan kenaikannya yang tinggi dalam 5 tahun terakhir dinilai tidak seimbang dengan pertumbuhan ekonomi terlebih jika diturunkan dalam pertumbuhan ekonomi per kapita. Dengan kondisi emas beberapa tahun ini yang cenderung sangat dipengaruhi pada kondisi global, perlu dilakukan analisa mendalam untuk menjadikan emas sebagai satu-satunya standar nisab zakat. Terlebih, berdasarkan beberapa analisa yang dilakukan, ke depan tren harganya diprediksi akan terus dipengaruhi secara signifikan oleh perkembangan faktor-faktor ekonomi, moneter, dan geopolitik yang kompleks.



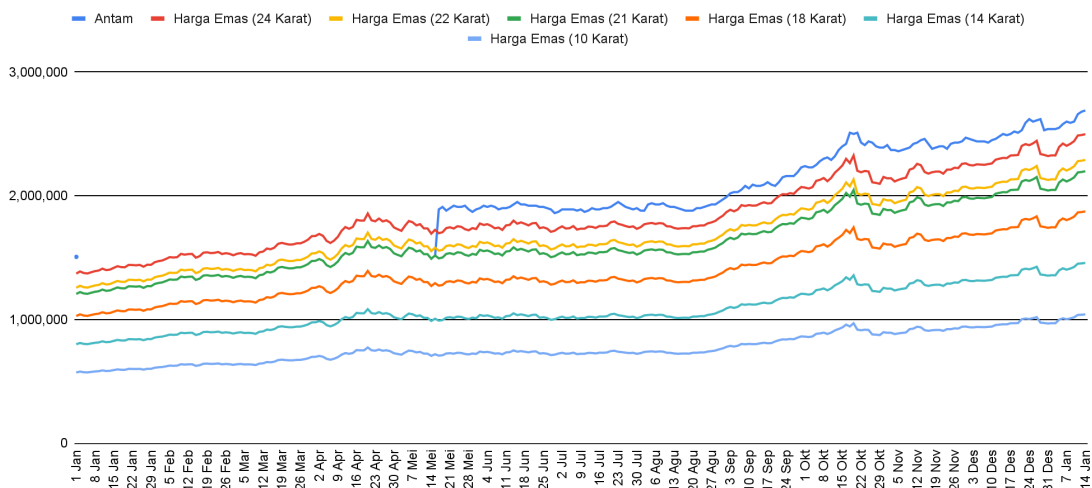
Gambar 1. Tren Harga Emas Dunia Satu Tahun Terakhir

Sumber : LBMA Precious Metal Prices

Grafik pergerakan harga emas global (24k) menunjukkan tren kenaikan yang signifikan sepanjang periode 2024 hingga akhir 2025. Data mencatat harga awal pada Januari 2024 berada di angka Rp1.022.018 per gram dan mengalami apresiasi berkelanjutan hingga mencapai Rp2.321.492 per gram pada penutupan tahun 2025. Secara akumulatif, instrumen ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 127,15%, dengan fluktuasi tertinggi terlihat pada kuartal terakhir tahun 2025 sesuai visualisasi data LBMA tersebut.

Lebih dalam jika melihat konteks mengenai harga emas di Indonesia, terdapat beberapa entitas yang merilis harga emas di Indonesia misalnya antam, Bank Emas Pegadaian, Bank Emas BSI, UBS dan berbagai entitas lainnya. Walaupun secara garis besar angka yang dirilis tidak jauh berbeda namun hal ini akan mempengaruhi penetapan nisab zakat pendapatan dan jasa terutama pada aspek teknis penilaian, yaitu konversi 85 gram emas ke dalam nilai rupiah. Harga emas di Indonesia berbeda antar lembaga, berubah cepat, dan dipengaruhi dinamika pasar global. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan nilai nisab antar waktu dan antar institusi, sehingga menyulitkan standarisasi penghitungan zakat pendapatan dan jasa di tingkat nasional.

Tabel ini menggambarkan perbandingan harga emas dalam rupiah berdasarkan jenis dan kadar karat, yaitu emas Antam, emas 24 karat, emas 22 karat, dan emas 21 karat, pada dua titik waktu serta implikasinya terhadap nilai rata-rata dan nisab zakat.



Gambar 2. Harga Emas Dalam Rupiah
Sumber : exchange-rates.org/id/logam-mulia, 2025

Tabel 1. Perbandingan Nisab berdasarkan Harga Jenis Emas

	Harga Emas Antam (24 Karat)	Harga Emas (24 Karat)	Harga Emas (22 Karat)	Harga Emas (21 Karat)	Harga Emas (18 Karat)	Harga Emas (16 Karat)	Harga Emas (14 Karat)	Harga Emas (10 Karat)
1 Jan 2025	1,506,000	1,370,723	1,256,496	1,206,236	1,028,042	970,746	799,589	571,135
31 Des 2025	2,540,000	2,321,492	2,128,034	2,042,913	1,741,119	1,644,081	1,354,204	967,288
Rata-Rata (geomean)*	2,117,357	1,807,337	1,656,726	1,590,457	1,355,503	1,279,956	1,078,609	753,057
Nisab	14,997,943	12,801,971	11,735,140	11,265,734	9,601,478	9,066,356	7,640,144	5,334,155

Sumber: Diolah peneliti, 2026

Pada 1 Januari 2025, harga emas Antam tercatat sebesar Rp1.506.000 per gram. Pada waktu yang sama, harga emas 24 karat berada di Rp1.370.723 per gram, harga emas 22 karat Rp1.256.496 per gram, harga emas 21 karat Rp1.206.236 per gram, harga emas 18 karat Rp1.028.042 per gram, harga emas 16 karat Rp970.746 per gram, harga emas 14 karat Rp799.589 per gram, dan harga emas 10 karat Rp 571.135 per gram.

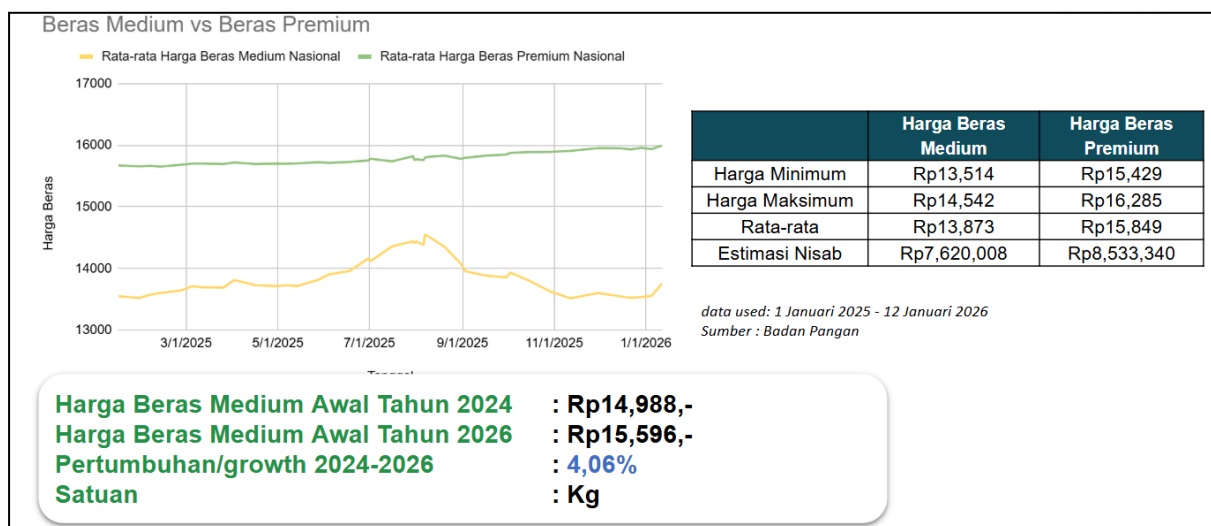
Pada akhir tahun tepatnya per tanggal 31 Desember 2025, seluruh jenis emas mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Harga emas Antam meningkat menjadi Rp2.540.000 per gram. Harga emas 24 karat naik menjadi Rp2.321.492 per gram. Harga emas 22 karat mencapai Rp2.128.034 per gram. Harga emas 21 karat tercatat Rp2.042.913 per gram. Harga emas 18 karat tercatat Rp1.741.119 per gram. Harga emas 16 karat tercatat Rp1.644.081 per gram. Harga emas 14 karat tercatat Rp1.354.204 per gram. Dan Harga emas 10 karat tercatat di angka Rp967.288 per gram.

Nilai rata-rata harga emas selama periode pengamatan menunjukkan level yang tinggi. Peneliti menggunakan metode Geometric Mean (*geomean*) dalam penghitungan nisab bertujuan meredam efek anomali harga (*outliers*), sehingga diperoleh nilai ambang batas zakat yang lebih objektif. Adapun rata-rata harga emas Antam sebesar Rp2.117.357 per gram. Rata-rata harga emas 24 karat tercatat Rp1.807.337 per gram. Rata-rata harga emas 22 karat sebesar Rp1.656.726 per gram. Rata-rata harga emas 21 karat mencapai Rp1.590.457 per gram. Rata-rata harga emas 18 karat mencapai Rp1.355.503 per gram. Rata-rata harga emas 16 karat mencapai Rp1.279.956 per gram. Rata-rata harga emas 14 karat mencapai Rp1.078.609 per gram. Dan rata-rata harga emas 10 karat tercatat Rp753.057 per gram. Berdasarkan rata-rata harga tersebut, apabila nisab zakat pendapatan menggunakan standar nisab emas menunjukkan perbedaan sesuai kadar karat. Nisab zakat pendapatan berdasarkan harga emas Antam berada pada Rp14.997.943 per bulan. Jika menggunakan emas 24 karat estimasi nisab zakat pendapatan dan jasa sekitar Rp12.801.971 per bulan. Jika menggunakan estimasi angka emas 22 karat sebesar Rp11.735.140 per bulan. Jika menggunakan estimasi angka emas 21 karat sebesar Rp11.265.734 per bulan. Jika menggunakan estimasi angka emas 18 karat sebesar Rp9.601.478 per bulan. Jika menggunakan estimasi angka emas 16 karat sebesar Rp9.066.356 per bulan. Selanjutnya jika menggunakan harga emas 14 karat angkanya berada pada Rp7.640.144 per bulan, dan apabila dengan emas 10 karat maka estimasi nisabnya Rp5.334.155 per bulan.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar emas, semakin tinggi pula harga dan nilai nisab zakat yang dihasilkan. Data ini juga menegaskan bahwa kenaikan harga emas berdampak langsung pada peningkatan ambang kewajiban zakat apabila emas digunakan sebagai standar nisab.

2. Harga Bahan pangan

Analisis terhadap dinamika harga bahan pangan pokok, khususnya beras sebagai komoditas utama masyarakat Indonesia, menjadi basis krusial dalam menentukan relevansi nilai nisab terhadap kondisi ekonomi riil. Berdasarkan data Badan Pangan periode Januari 2024 hingga Januari 2026, pergerakan harga beras nasional menunjukkan tren yang cenderung meningkat dengan karakteristik yang berbeda pada tiap kelasnya. Beras Premium mencatatkan pergerakan yang lebih stabil namun konsisten meningkat (gradual), dengan rata-rata harga tahunan sebesar Rp15.849 per kilogram. Di sisi lain, Beras Medium menunjukkan volatilitas yang lebih tinggi, terutama pada periode kuartal ketiga tahun 2025, sebelum akhirnya ditutup pada level harga yang lebih tinggi di awal tahun 2026 dengan rata-rata Rp13.873 per kilogram.



Gambar 3. Tren Harga Bahan Pangan

Sumber : Badan Pangan (2025), diolah

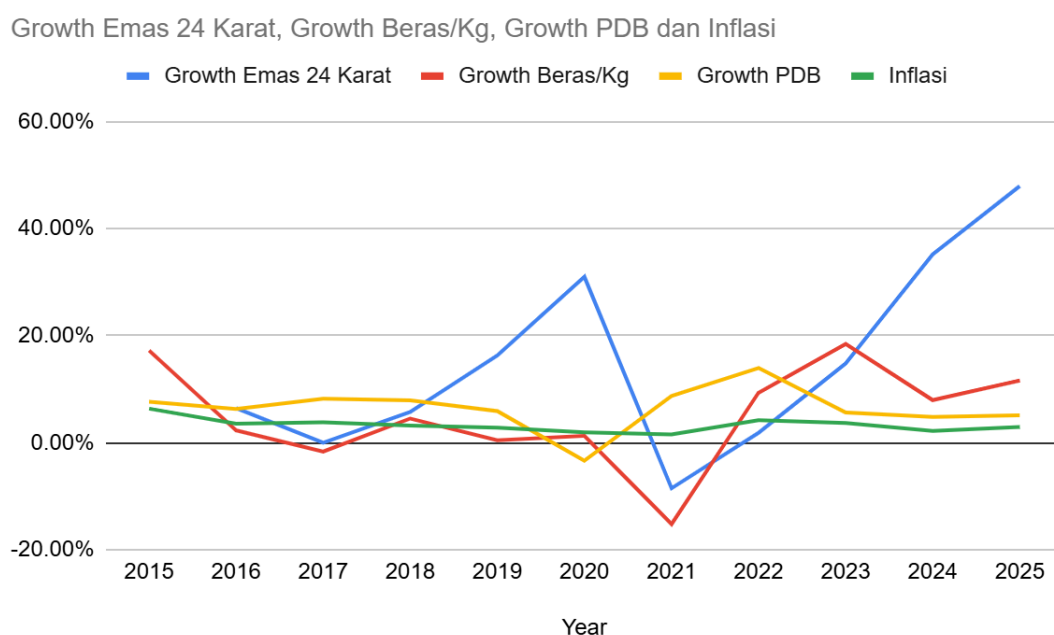
Secara akumulatif, jika membandingkan data awal tahun 2024 hingga akhir tahun 2025, terjadi pertumbuhan harga (growth) pada beras medium sebesar 4,06%. Kenaikan harga dari Rp 14.988 menjadi Rp15.596 per kilogram ini mengkonfirmasi adanya tekanan inflasi pangan yang secara langsung menggerus daya beli riil masyarakat. Peningkatan biaya hidup ini memberikan justifikasi kuat bagi perlunya peninjauan kembali ambang batas (threshold) kewajiban zakat agar tetap selaras dengan prinsip keadilan ekonomi.

Dalam konteks penetapan kebijakan, fluktuasi harga ini berimplikasi langsung pada estimasi nilai nisab. Dengan menggunakan basis harga pasar terkini, nilai nisab tahunan yang setara dengan kadar pangan pokok berada pada kisaran Rp7.620.008 untuk standar beras medium dan Rp8.533.340 untuk standar beras premium. Adanya selisih atau gap harga antara kedua jenis beras tersebut mengharuskan pemilihan instrumen patokan yang paling representatif terhadap tingkat konsumsi mayoritas muzakki. Oleh karena itu, data ini

menjadi pondasi dalam mengkalibrasi ulang angka nominal nisab pendapatan dan jasa guna memastikan kepastian hukum dan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya di tahun 2026.

3. Perbandingan stabilitas harga emas, beras, inflasi dan income perkapita di Indonesia

Dalam lanskap ekonomi Indonesia periode 2025, terjadi ketimpangan stabilitas yang mencolok antara harga emas dan harga pangan. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan harga emas 24 karat sangat bergejolak dengan rentang fluktuasi mencapai 47,95%. Sebaliknya, meskipun harga beras tetap bisa melonjak, pergerakannya lebih terbatas dengan rentang fluktuasi yang lebih kecil 11,63% dibandingkan dengan emas sebesar 47,95%. Angka ini membuktikan bahwa emas jauh lebih sensitif terhadap sentimen keuangan global, sementara beras lebih stabil karena terikat pada faktor produksi dan distribusi domestik di dalam negeri.



Gambar 4. Perbandingan Stabilitas Harga Emas, Beras, PDB, dan Inflasi di Indonesia (Periode 2015–2025)

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia, dan World Bank (data diolah, 2024).

Ketidaksamaan laju pertumbuhan ini berdampak langsung pada daya beli dan tingkat pendapatan masyarakat (*income per kapita*). Selama periode tersebut, pertumbuhan PDB nasional sering kali tidak mampu mengejar lonjakan harga emas 24 karat. Sebagai contoh,

saat pertumbuhan PDB berada di angka 6.49% pada 2025, pertumbuhan harga emas justru meroket sebesar 47.95%. Kondisi ini menyebabkan standar kekayaan berbasis emas 24 karat menjadi semakin jauh dari jangkauan rata-rata penduduk yang kenaikan pendapatannya lebih sejalan dengan tingkat inflasi domestik yang terjaga di kisaran rendah, seperti pada tahun 2025 yang hanya sebesar 2,92%. Oleh karena itu, menggunakan emas 24 karat sebagai standar tunggal untuk mengukur kewajiban finansial masyarakat menjadi kurang relevan dengan realitas pendapatan yang ada.

Dalam konteks penetapan nishab zakat pendapatan dan jasa di Indonesia, terdapat urgensi untuk melakukan reorientasi terhadap standar nisab agar lebih mencerminkan realitas ekonomi domestik senilai standar *zиро'ah* (pertanian) sebesar 524 kg beras yang menawarkan stabilitas nilai jauh lebih tinggi dibandingkan fluktuasi harga emas dunia yang mencapai 43,70%. Oleh karena itu, BAZNAS mendorong agar regulasi dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) ke depan tidak lagi bersifat kaku atau tunggal, melainkan menyediakan ruang atau pilihan standar emas, perak, maupun pertanian yang dinilai lebih berkeadilan karena harga beras cenderung bergerak selaras dengan kenaikan pendapatan riil masyarakat Indonesia. Dengan memberikan fleksibilitas standar *zиро'ah* dalam PMA, sistem zakat nasional akan memiliki landasan kebijakan yang kuat untuk melindungi muzaki dari lonjakan ambang batas yang tidak wajar akibat spekulasi pasar global, sekaligus memastikan bahwa kewajiban berzakat tetap berjalan secara inklusif dan mencapai tujuan kemaslahatan bagi mustahik dan muzaki tanpa mengganggu program jaring pengaman sosial bagi fakir miskin akibat volatilitas harga komoditas non-pangan.

E. SEJARAH KEBERADAAN EMAS DARI ZAMAN RASUL HINGGA SAAT INI

Keberadaan Emas

Emas telah dikenal secara luas sejak zaman sebelum Masehi, di mana fungsinya tidak hanya terbatas sebagai perhiasan semata, tetapi juga menjadi media ekspresi kekuasaan yang sakral. Salah satu peninggalan arkeologi paling ikonik adalah Topeng Emas Firaun Tutankhamun (22k) yang mencerminkan simbol kekuasaan, keabadian, dan kemewahan peradaban Mesir Kuno pada masanya. Selain di Mesir, bukti penggunaan emas yang sangat tua juga ditemukan di kawasan Eropa Timur, tepatnya di Varna, Bulgaria, melalui koleksi perhiasan kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 6.000 tahun. Berbagai bentuk kalung, gelang, hingga mahkota kecil yang ditemukan di sana menunjukkan bahwa sejak masa itu, emas sudah menjadi parameter utama dalam menentukan kekayaan dan kedudukan sosial seseorang.

Evolusi penggunaan emas untuk beragam perhiasan terus berlanjut pada masa peradaban Sumeria di Irak Selatan sekitar 3000 SM, serta ditemukan pula pada makam raja

dinasti Mesir pertama, yaitu Raja Djer di Abydos pada 2500 SM. Perjalanan emas kemudian mencapai titik krusial saat mulai bertransformasi menjadi alat tukar resmi sejak 1500 SM. Pada periode ini, Mesir tumbuh menjadi bangsa yang sangat kaya karena menguasai wilayah Nubia yang memiliki cadangan emas melimpah. Keberlimpahan sumber daya ini pada akhirnya membuat emas diakui secara luas sebagai standar alat tukar utama dalam sistem perdagangan internasional, memperkuat dominasi ekonomi lintas wilayah pada zaman tersebut.

Sejarah Pembagian Jenis Emas Berdasar Kualitas Karat

Istilah kata "karat" memiliki akar historis yang berasal dari bahasa Yunani, tepatnya dari kata "*keration*" yang berarti biji buah carob. Jejak sejarah ini membawa kita kembali ke masa pemerintahan Kaisar Romawi Konstantin (306 Masehi), di mana pada saat itu sang Kaisar memutuskan untuk memperkenalkan sebuah standar baru guna mengukur tingkat kemurnian emas secara lebih sistematis.

Kaisar Konstantin memilih biji buah carob sebagai dasar standar pengukuran ini karena biji tersebut dianggap memiliki massa yang sangat konsisten dan dapat diandalkan untuk menilai kemurnian logam mulia. Melalui penetapan historis inilah, emas murni kemudian diakui setara dengan standar 24 karat atau 24k, sebuah satuan ukuran yang tetap digunakan secara global hingga saat ini sebagai parameter kemurnian emas dalam berbagai transaksi dan perhiasan.

***Naqdain* (Dinar-Dirham): Dalil Asal Nishab Emas**

Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan dalam Shahih Sunan Abi Dawud (no. 1391), Rasulullah ﷺ menjelaskan ketentuan nishab dan kadar zakat atas harta berupa perak dan emas.

إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمْسُهُ دَرَاهِمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يَعْنِي فِي الذَّهَبِ- حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ.

Artinya : Apabila engkau memiliki 200 dirham dan telah lewat satu tahun, maka zakatnya sebanyak 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat (emas) kecuali engkau memiliki 20 dinar, jika engkau memiliki 20 dinar dan telah lewat satu tahun, maka zakatnya setengah dinar

Hadits ini menjadi dasar penetapan nishab dan tarif zakat sebesar 2,5%, karena 5 dirham dari 200 dirham maupun setengah dinar dari 20 dinar sama-sama menunjukkan proporsi seperempat puluh (1/40). Ketentuan ini menegaskan bahwa zakat hanya diwajibkan atas harta yang telah mencapai batas minimum (nishab) dan telah memenuhi syarat kepemilikan selama satu tahun (haul).

Secara konseptual, ketentuan yang disampaikan Rasulullah ﷺ ini menunjukkan bahwa nisab zakat bisa berlandaskan dinar bisa juga dirham, di mana keduanya memiliki kedudukan yang sama yang dapat digunakan sebagai batas minimum kewajiban zakat (Nisab).

Nilai Dinar Pada Masa Rasulullah: 1 Ekor Kambing Kurban

أَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ أُضْحِيَّةً – أَوْ شَاةً – فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ ، فَاتَّاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ ، فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى ثُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ .

“Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam memberinya satu dinar untuk dibelikan hewan kurban (atau seekor kambing. Lalu dengan 1 dinar tersebut dia dapat membeli dua ekor kambing. Salah satunya dijual dengan seharga satu dinar, lalu dia memberi Nabi seekor kambing dan satu dinar. Maka Nabi mendoakannya agar mendapatkan keberkahan dalam jual belinya. Maka sejak saat itu, seandainya dia membeli debu sekalipun, maka dia mendapatkan keuntungan” (HR. at-Tirmizi no. 1258, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih at-Tirmizi).

Dalam hadits disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ memberikan 1 dinar kepada seorang sahabat Urwah untuk membeli seekor kambing. Secara historis, 1 dinar setara dengan 4,25 gram emas murni (24 karat). Artinya, nilai dinar mengikuti harga emas. Jika dikaitkan dengan ilustrasi harga masa kini, misalnya harga kambing ± Rp4.000.000 per ekor, maka 1 dinar kira-kira berada pada kisaran nilai tersebut (karena dalam kisah itu 1 dinar cukup untuk membeli seekor kambing). Sekarang kita hubungkan dengan ketentuan nishab emas dalam hadits sebelumnya, yaitu 20 dinar. Jika 1 dinar kira-kira setara harga 1 ekor kambing kurban seberat 30 kg +/- Rp. 4.000.000, maka:

$$20 \text{ dinar} \times \text{Rp}4.000.000 = \text{Rp}80.000.000$$

Artinya, kisaran nilai 20 dinar pada zaman nabi pada hari ini kurang lebih setara ± Rp80 jutaan. Inilah gambaran bahwa standar nilai nishab yang ditetapkan Rasulullah ﷺ memang berada pada level kepemilikan yang cukup moderat. Dengan memahami konversi ini, kita bisa melihat bahwa konsep nishab sejak masa Nabi ﷺ memang berbasis pada nilai, dan jika ditarik ke konteks sekarang, angkanya memang berada di kisaran puluhan juta rupiah, kurang lebih sekitar 80–90 jutaan tergantung harga emas yang berlaku.

Jenis Emas di Indonesia

Emas merupakan logam mulia yang langka, bernilai tinggi, dan memiliki karakteristik khas. Kilau alamnya sejak dahulu membuat emas dipandang sebagai simbol kekayaan sekaligus

digunakan sebagai alat tukar. Salah satu sifat unik emas adalah semakin tinggi tingkat kemurniannya, semakin lunak pula teksturnya. Karena sifatnya yang terlalu lunak, emas murni relatif kurang kuat untuk digunakan dalam aktivitas sehari-hari, terutama dalam bentuk perhiasan.

Untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahannya (durabilitas), emas biasanya dicampur dengan logam lain seperti perak, tembaga, atau logam tertentu lainnya. Campuran ini menghasilkan perhiasan yang lebih kokoh dan tidak mudah berubah bentuk saat dipakai. Dalam konteks ini, penting untuk memahami istilah “kadar” emas, yaitu tingkat kemurnian emas dalam suatu campuran logam.

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. SNI 8880:2020, kadar emas dibagi dalam beberapa tingkatan, mulai dari 24 karat (emas murni) hingga 8 karat, yang menunjukkan proporsi kandungan emas dalam produk tersebut. Dalam PMA 31/2019 dan fatwa MUI, belum termaktub secara eksplisit apakah emas yang dimaksud adalah jenis emas murni (24k) atau dengan berbagai jenisnya. Dalam perspektif fikih, hal demikian masih menjadi ruang diskursus (*khilaf*) mengingat objek zakat dalam konteks modern saat ini bukanlah emas secara fisik, melainkan al-Nuqud (*fiat money*) yang sejatinya tidak lagi disandarkan pada nilai intrinsik emas.

F. Jenis Emas Menurut Empat Mazhab

Dalam diskursus fiqh, ulama mazhab sepakat dengan standar 85 gram emas hasil dari konversi 20 dinar. Namun demikian terjadi perbedaan pendapat (*khilaf*) maksud 85 gram tersebut apakah harus dari emas murni atau boleh dengan campuran lainnya. Sebagaimana berikut:

1. Madzhab Syafii dan Hambali: Emas Murni (24k)

Mengutip penjelasan *Abdurrahman al-Jaziri* dalam kitab *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*:

إذا كان الذهب أو الفضة مخلوطان بشيء آخر من نحاس أو نيكل، فلا زكاة
فيهما حتى يبلغ ما فيهما من الذهب والفضة الخالصين

Jika emas atau perak bercampur dengan zat lain seperti tembaga atau nikel, maka tidak ada kewajiban zakat pada keduanya hingga kadar emas atau perak murninya mencapai nishab yang sempurna.

Kutipan di atas mencerminkan sikap kehati-hatian (احتياط) yang dipegang teguh oleh Madzhab Syafi'i dan Hanbali. Dalam pandangan ini, zakat adalah ibadah yang berkaitan langsung dengan substansi logam mulia ('ain al-mal), sehingga keberadaan logam

campuran non-zakat dianggap sebagai "beban berat" yang tidak boleh dihitung dalam penghitungan nishab. Secara teknis, hal ini menuntut adanya proses konversi atau pemisahan nilai netto (murni) sebelum kewajiban zakat ditetapkan.

2. Madzhab Maliki: Melihat Keberlakuan di Pasar

Lebih lanjut, Mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat tetap wajib sesuai dengan timbangan 85 gram emas meskipun kurang kadar kemurniannya, asalkan emas tersebut masih diterima dalam transaksi di pasar, jika logam campuran itu sama sekali tidak diterima atau tingkat penerimaannya lebih rendah dibanding logam murni, maka perhitungan zakatnya hanya didasarkan pada bagian emas atau perak murni yang terkandung di dalamnya. Apabila bagian murni itu mencapai nisab yakni 85 gram emas, zakat wajib dikeluarkan. Jika tidak mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat.

المالكية قالوا: الذهب والفضة المغشوشان إن راجا في الاستعمال رواج الخالص من الغش وجبت زكاته كخالص سواء، وإن لم يروجا في الاستعمال كرواج الخالص، فإما أن يبلغ الصافي فيهما نصاباً أو لا، فإن بلغ نصاباً زكي الخالص. وإلا فلا

Madzhab Maliki berpendapat: Emas dan perak yang bercampur (dengan logam lain), jika dalam penggunaannya berlaku (laku/populer) sebagaimana emas dan perak murni, maka wajib dizakati sama seperti zakat emas/perak murni. Namun, jika keduanya tidak berlaku (tidak populer) sebagaimana emas/perak murni, maka ada dua kemungkinan: apakah kadar emas/perak murninya mencapai nishab atau tidak. Jika (kadar murninya) mencapai nishab, maka yang dizakati adalah bagian murninya saja. Jika tidak mencapai nishab, maka tidak ada kewajiban zakat.

Mazhab Maliki menitikberatkan pada keberlakuan di pasar:

قَالَ الْمَالِكِيُّ: إِنْ كَانَتْ مَسْكُوكُ الدَّرَاهِمِ وَالْدَّنَانِيرِ الْمَغْشُوشَةِ رَاجَةً كَرَوَاجِ غَيْرِ الْمَغْشُوشَةِ فَإِنَّهَا تُعَامَلُ كَالْكَامِلَةِ، فَتَكُونُ فِيهَا

Mazhab Maliki berkata: jika uang dirham dan dinar yang tercampur itu berlaku luas seperti berlakunya yang tidak tercampur, maka ia diperlakukan seperti yang sempurna.

Mazhab Maliki menekankan aspek fungsi sosial dan penerimaan masyarakat. Selama uang tercampur tersebut beredar normal dan diterima sebagai alat tukar, maka ia diperlakukan seperti uang sempurna dan dikenai zakat sebagaimana mestinya (Kuwait Ministry of Awqaf and Islamic Affairs, n.d.).

وذهب المالكية: إلى وجوب الزكاة في المغشوش وناقص الوزن إن راج كل رواج الكامل في المعاملات، فإن لم ترج أصلاً، أو راجت دون رواج الكاملة، حسب الخالص في المغشوش، فإن بلغ نصاباً زكي، وإلا فلا

Mazhab Maliki berpendapat wajibnya zakat pada logam yang tercampur dan yang kurang timbangan apabila berlaku dalam transaksi sebagaimana berlakunya yang sempurna. Jika tidak berlaku sama sekali, atau berlaku tetapi tidak seperti berlakunya yang sempurna, maka yang diperhitungkan adalah kadar murni dalam uang tercampur. Jika mencapai nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Jika tidak, maka tidak ada zakat.

3. Madzhab Hanafi: *Al-Hukm lil gholib* (Sepanjang Dominan Emas, maka Emas)

Dalam kitab *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Fikih Berdasarkan Empat Madzhab) Jilid 1 Halaman 555 dijelaskan:

(١) الحنفية قالوا: يعتبر في المغشوش الغالب من الذهب أو الفضة أو غيرهما، فالذهب المخلوط بالفضة إن غلب فيه الذهب زكى زكاة الذهب، واعتبر كله ذهباً، وإن غلب فيه الفضة، فحكمه كله حكم الفضة في الزكاة؛ فإن بلغ نصاباً زكي، وإلا فلا؛ أما إن كان الغالب النحاس، فإن راج في الاستعمال رواج النقد، وبلغت قيمته نصاباً زكي، كالنقود، وكذلك يزكى زكاة النقد إن كان الخالص فيه يبلغ نصاباً، فإن لم يرج، ولم يبلغ خالصه نصاباً، فإن نوى به التجارة كان كعروض التجارة، فيقوم، وتزكى القيمة، وإلا فلا تجب فيه الزكاة.

Mazhab Hanafi berkata: Dalam emas, perak, atau logam lain yang dicampur, logam yang dominanlah yang dipertimbangkan. Jika emas dicampur dengan perak, dan emas dominan, maka campuran tersebut dikenakan zakat sebagai emas, dan seluruh campuran dianggap sebagai emas. Jika perak dominan, maka seluruh campuran diperlakukan sebagai perak untuk tujuan zakat. Jika mencapai nisab (ambang batas minimum), maka zakat wajib dibayarkan; jika tidak, tidak wajib dibayarkan. Jika tembaga dominan, maka jika banyak digunakan seperti mata uang dan nilainya mencapai nisab, maka zakat wajib dibayarkan, seperti halnya mata uang. Demikian pula, zakat wajib dibayarkan atas mata uang jika kadar kemurniannya mencapai nisab. Jika tidak banyak digunakan dan kadar kemurniannya tidak mencapai nisab, maka jika ditujukan untuk perdagangan, maka diperlakukan seperti barang dagangan. Mata uang tersebut dinilai, dan zakat dibayarkan berdasarkan nilainya; jika tidak, tidak wajib dibayarkan zakat

Dalam prinsipnya, status hukum sebuah logam mulia ditentukan oleh unsur yang dominan. Jika kandungan emas dalam suatu benda mencapai setengah atau lebih (dominan), maka secara hukum benda tersebut dapat diperlakukan sebagai emas seutuhnya dalam perhitungan zakat. Pandangan ini membuka peluang bagi kita untuk melihat kembali realita di tengah masyarakat, di mana perhiasan sering kali memiliki kadar

yang bervariasi demi mengejar ketahanan dan estetika. Secara lengkap Dar al-Ifta al-Misriyyah. 2011. Al-rajiḥ i'tibar al-khalish fi zakat al-dzahab wa al-fidhdhah. Fatwa nomor 12511, Kairo menjelaskan:

وقال أبو حنيفة إن كان الغش مثل نصف الفضة أو الذهب أو أكثر فلا زكاة حتي يبلغ الخالص نصاباً، وإن كان أقل وجبت الزكاة إذا بلغ بغشه نصاباً بناء علي أصله أن الغش إذا نقص عن النصف سقط حكمه حتى لو اقترض عشرة دراهم لا غش فيها فرد عشرة فيها ستة فضة والباقي غش لزم المقرض قبولها ويبرأ المقرض بها ولو ملك مائتين خالصة فأخرج زكاتها خمسة مغشوشة قال تجزئه، قال الماوردي: وفساد هذا القول ظاهر والاحتجاج عليه تكلف ويكفي في رده قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. انتهى.

Abu Hanifah mengatakan: Jika campuran dalam perak atau emas itu separuh atau lebih, maka tidak ada kewajiban zakat sampai bagian yang murni mencapai nisab. Namun jika campurannya kurang dari separuh, maka zakat wajib jika seluruhnya (termasuk campuran) mencapai nisab. Pendapat ini didasarkan pada prinsip beliau bahwa campuran yang kurang dari separuh diabaikan hukumnya. Sehingga, misalnya, jika seseorang meminjam 10 dirham murni, lalu mengembalikan 10 dirham yang mengandung 6 bagian perak murni dan sisanya campuran, maka pemberi pinjaman wajib menerimanya dan peminjam bebas dari tanggungan. Begitu pula jika seseorang memiliki 200 dirham murni, lalu mengeluarkan zakatnya berupa 5 dirham yang mengandung campuran, maka hal itu dianggap sah (Islamweb, 2011).

Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, Juz 2, hlm. 302. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

وذهب الحنفية إلى أنه إذا سبك أحد النقيدين بغيره، فما غلبت فضته أو ذهبه فكالخالص منهما، وكذا ما استوى فيه النقد وغيره احتياطاً، ومراعاة لحال الفقراء، وإن سبك الذهب والفضة، فإن كان الذهب غالباً، فالكل في حكم الذهب الخالص، وكذا إذا استويا، لأنه أعز وأعلى قيمة، وإن كانت الفضة غالبية، وبلغت نصاباً، ففيه زكاتها، وإن بلغ الذهب نصاباً ففيه زكاته، وما غلب غشه ولم يكن ثمنًا رائجاً، تعتبر قيمته لا وزنه، فإن بلغت نصاباً من أقل نقد، تفرض فيه الزكاة إن نوى فيه التجارة وإلا فلا.

وذهب المالكية: إلى وجوب الزكاة في المغشوش ونقص الوزن إن راج كل رواج الكامل في المعاملات، فإن لم ترج أصلاً، أو راجت دون رواج الكاملة، حسب الخالص في المغشوش، فإن بلغ

نصاباً زكياً، وإلا فلا

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila salah satu dari dua mata uang (emas atau perak) dicampur dengan logam lain, maka logam yang kandungan perak atau emasnya lebih dominan dihukumi sama seperti emas atau perak murni. Hal yang sama juga berlaku apabila kadar mata uang asli dan campurannya seimbang, sebagai bentuk kehati-hatian dan pertimbangan terhadap kondisi masyarakat miskin. Namun, apabila emas dan perak dicampur menjadi satu, dan emas lebih dominan, seluruh campuran itu dianggap sebagai emas murni. Ketika kadar keduanya sama, campuran itu juga dihukumi sebagai emas murni karena nilai emas lebih tinggi dan lebih berharga. Jika perak yang lebih dominan dan mencapai nisab, maka zakat yang dikenakan adalah zakat perak. Sebaliknya, jika emas yang mencapai nisab, zakat emas yang berlaku. Adapun campuran yang didominasi bahan lain dan tidak lagi digunakan sebagai alat tukar yang berlaku, penilaiannya didasarkan pada nilai, bukan berat. Apabila nilainya mencapai nisab berdasarkan standar mata uang terendah, maka zakat wajib dikeluarkan jika barang tersebut dimaksudkan untuk diperdagangkan. Jika tidak, maka tidak ada kewajiban zakat.

وَقَالَ الْحَنَفِيُّ: إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرَقِ الْمَسْكُوكِ الْفِضَّةُ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَضْرُوبِ، فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ كَأَنَّهُ كُلُّهُ فِضَّةٌ، وَلَا تُزَكَّى زَكَاةُ الْعُرُوضِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْغَالِبُ الْغَشَّ فَلَا يَكُونُ لَهَا حُكْمُ الْفِضَّةِ بَلْ حُكْمُ الْعُرُوضِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهَا إِلَّا إِنْ نَوَاهَا لِلتَّجَارَةِ وَبَلَغَتْ نِسَابًا بِالْقِيَمَةِ

Mazhab Hanafi berkata: apabila yang dominan pada uang kertas atau uang logam adalah perak, maka hukumnya seperti uang perak yang dicetak. Zakat wajib atasnya seakan-akan seluruhnya adalah perak, dan tidak dizakati sebagai zakat barang dagangan. Adapun jika yang dominan adalah campuran, maka ia tidak memiliki hukum perak, tetapi hukum barang dagangan. Tidak ada zakat padanya kecuali jika diniatkan untuk perdagangan dan nilainya mencapai nisab.

Hal serupa juga disampaikan oleh Jamāl ad-Dīn ‘Abdullāh bin Yūsuf az-Zaila’i, pada kitab Nashb ar-Rāyah fī Takhrīj Aḥādīth al-Hidāyah. Dalam kitab tersebut, dijelaskan penentuan hukum zakat atas harta yang tercampur dengan unsur lain berdasarkan unsur yang dominan. Jika perak lebih dominan, maka hukumnya mengikuti perak. Jika campuran lebih dominan, maka diperlakukan sebagai barang dagangan dengan syarat nisab dan niat perdagangan.

(وإذا كان) (الغالب على الورق الفضة) (فهو في حكم الفضة ، وإذا كان [ص: 437] الغالب عليها الغش فهو في

حكم العروض ، يعتبر أن تبلغ قيمته نصاباً (لأن الدراهم لا تخلو عن قليل غش ؛ لأنها لا تتطبع إلا به ، وتخلو عن الكثير ، فجعلنا الغلبة فاصلة ، وهو أن يزيد على النصف اعتباراً للحقيقة ، وسنذكره في الصرف إن شاء الله تعالى ، إلا أن في غالب الغش لا بد من نية التجارة كما في سائر العروض ، إلا إذا كان تخلص منها فضة تبلغ نصاباً ؛ لأنه لا يعتبر في عين الفضة القيمة ولا نية التجارة ، والله أعلم .

“Dan apabila yang dominan pada uang perak adalah perak, maka hukumnya mengikuti perak. Dan apabila yang dominan padanya adalah campuran, maka hukumnya mengikuti barang dagangan. Dalam hal ini, dipersyaratkan bahwa nilainya mencapai nisab. Karena dirham tidak pernah terbebas dari sedikit campuran, sebab ia tidak dapat dicetak kecuali dengan campuran tersebut, namun terbebas dari campuran yang banyak. Oleh karena itu, kami menjadikan dominasi sebagai pembeda, yaitu apabila melebihi setengah, dengan mempertimbangkan hakikatnya. Hal ini akan kami jelaskan dalam pembahasan sharf, insya Allah Ta’ala. Namun, pada campuran yang dominan, tetap disyaratkan adanya niat perdagangan sebagaimana pada seluruh barang dagangan, kecuali apabila dapat dipisahkan darinya perak murni yang mencapai nisab. Karena pada perak itu sendiri, tidak dipersyaratkan nilai maupun niat perdagangan. Dan Allah Maha Mengetahui.”

Sementara itu, dalam kitab Nashb ar-Rāyah fī Takhrīj Ahādīth al-Hidāyah yang ditulis oleh Jamāl ad-Dīn ‘Abdullāh bin Yūsuf az-Zaila’i menjelaskan tentang takhrij hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Hidāyah karya Al-Marghīnānī. Kitab ini menjadi rujukan utama dalam fikih mazhab Hanafi, terutama ketika membahas dalil hadis dalam masalah muamalah dan zakat.

وذهب الحنفية إلى أنه إذا سبك أحد النقيدين بغيره، فما غلبت فضته أو ذهبه فكالخالص منهما، وكذا ما استوى فيه النقد وغيره احتياطاً، ومراعاة لحال الفقراء، وإن سبك الذهب والفضة، فإن كان الذهب غالباً، فالكل في حكم الذهب الخالص، وكذا إذا استويا، لأنه أعز وأعلى قيمة، وإن كانت الفضة غالبية، وبلغت نصاباً، ففيه زكاتها، وإن بلغ الذهب نصاباً ففيه زكاته، وما غلب غشه ولم يكن ثمناً رائجاً، تعتبر قيمته لا وزنه، فإن بلغت نصاباً من أقل نقد، تفرض فيه الزكاة إن نوى فيه التجارة وإلا فلا

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa apabila salah satu dari dua jenis uang dicampur dengan selainnya, maka yang dominan perak atau emasnya diperlakukan seperti murni. Demikian pula jika antara uang dan selainnya seimbang, sebagai bentuk kehati-hatian dan memperhatikan kondisi fakir miskin. Apabila emas dan perak dicampur, lalu emas yang dominan, maka seluruhnya dihukumi sebagai emas murni. Demikian pula jika keduanya seimbang, karena emas lebih langka dan lebih tinggi nilainya. Jika perak yang dominan dan mencapai nisab, maka wajib zakat peraknya. Jika emas mencapai nisab, maka wajib zakat

emasnya. Adapun yang dominan campurannya dan tidak menjadi alat tukar yang berlaku, maka yang diperhitungkan adalah nilainya, bukan timbangannya. Jika nilainya mencapai nisab dari jenis uang yang paling rendah, maka zakat diwajibkan apabila diniatkan untuk perdagangan. Jika tidak, maka tidak ada zakat.

Dalam Kitab Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Juz 3 Karya Wahbah az-Zuhaili dijelaskan:

قال الحنفية: غالب الفضة فضة، وغالب الذهب ذهب، وإذا كان الغالب عليهما الغش، فهي في حكم العروض التجارية، ولا بد من أن تبلغ قيمتها نصاباً، ولا بد فيها من نية التجارة كسائر العروض..

Menurut mazhab Hanafi: perhiasan yang mayoritasnya perak dihukumi sebagai perak, dan yang mayoritasnya emas dihukumi sebagai emas. Apabila kandungan campurannya (logam selain emas atau perak) lebih dominan, maka hukumnya seperti barang dagangan.

Mazhab Hanafi menggunakan ukuran dominasi dan kehati-hatian sosial dalam menentukan status zakat uang tercampur, dengan memberikan prioritas kepada emas dalam penilaian hukum karena nilainya dan kelangkaannya dibanding perak, sehingga penentuan zakat disesuaikan dengan logam yang dominan dan telah mencapai nisab masing-masing, sementara uang yang dominan campurannya diperlakukan sebagai barang dagangan yang bergantung pada niat serta nilai pasar.

Setelah menganalisis diskusi mengenai standar nisab zakat pendapatan dan jasa berdasarkan standar emas berdasarkan kemurniannya, pembahasan selanjutnya adalah identifikasi kemurnian emas yang dinyatakan melalui sistem karatase, yaitu sebuah standarisasi internasional yang membagi kadar emas ke dalam 24 bagian. Standar 24 karat diposisikan sebagai representasi emas murni (setara dengan 99,9%). Jika dilakukan penarikan garis hukum (istinbath) dari logika Mazhab Hanafi yang menetapkan bahwa status hukum sebuah logam mulia ditentukan oleh unsur yang dominan (al-ghalabah) maka klasifikasi zakat atas perhiasan masyarakat saat ini dapat dipetakan secara proporsional.

Emas: Al-Hukm Lil Gholib

Berdasarkan kaidah "*al-hukmu lil ghalib*" (hukum mengikuti yang dominan) sebagaimana diutarakan mazhab Hanafi di atas, maka emas dengan kadar mencapai setengah atau lebih (minimal 50% atau setara 12 karat) secara otomatis masuk dalam kategori emas yang wajib dizakati berdasarkan berat totalnya.

Tabel 2. Kadar Emas pada Setiap Karatase dan Relevansi Fikih

Karatase	Persentase Emas Murni	Relevansi Fikih (Perspektif Dominasi)
24 Karat	99,90% - 99,98%	Objek zakat tanpa perselisihan.
22 Karat	91,67% - 95,82%	Dominan: Dihukumi sebagai emas (Mazhab Hanafi atau Maliki).
18 Karat	75,00% - 79,16%	Dominan: Dihukumi sebagai emas (Mazhab Hanafi atau Maliki).
14 Karat	58,33% - 62,49%	Dominan: Masih di atas 50%, dihukumi emas (Mahzab Hanafi)
12 Karat	50,00% - 54,15	Batas (Ihtiyat): Titik keseimbangan (Mazhab Hanafi: Hati-hati).
9 Karat	37,50% - 41,66%	Campuran Dominan: Dihukumi sebagai barang dagangan (Urudl Tjarah).

Sumber: SNI 8880:2025 Barang-Barang Emas (BSN), diolah DKPN 2026

Jika diskursus fikih yang telah dibahas sebelumnya diproyeksikan ke dalam standar karatase modern, maka emas 14 karat muncul sebagai titik penting yang menarik untuk dikaji. Dengan kandungan emas murni sekitar 58,33 – 62,49%, emas jenis ini telah melampaui ambang batas simplifikasi hukum dalam Mazhab Hanafi. Karena unsur emasnya tetap menjadi unsur dominan (*al-ghalabah*), maka secara filosofis, perhiasan dengan kadar 14 karat ke atas dapat diperlakukan sebagai emas seutuhnya. Hal ini memberikan legitimasi praktis bagi muzakki untuk menghitung nisab berdasarkan berat total fisik harta (85 gram) dengan tarif zakat 2,5%, tanpa harus melalui proses teknis pemisahan kadar murni yang rumit.

Argumen ini semakin kokoh jika disandingkan dengan perspektif Mazhab Maliki. Berbeda dengan pendekatan teknis karatase, Mazhab Maliki lebih menekankan pada aspek fungsional dan sosiologis suatu aset. Dalam pandangan ini, kriteria utama kewajiban zakat bukan terletak pada persentase kemurnian absolut, melainkan pada akseptabilitas pasar (*rawaj*). Selama emas dengan karatase tertentu termasuk 14 karat atau yang lebih rendah diterima secara masif sebagai instrumen penyimpan nilai dan diperjualbelikan dengan harga stabil di tengah masyarakat, maka logam tersebut sah untuk dijadikan standar acuan nisab zakat pendapatan dan jasa.

Integrasi kedua mazhab ini memberikan solusi yang lebih adaptif, Mazhab Hanafi memberikan kepastian melalui dominasi unsur, sementara Mazhab Maliki memberikan kelenturan melalui realitas pasar. Pendekatan ini memastikan bahwa standarisasi zakat tetap berpijak pada nilai ekonomi riil yang berlaku di masyarakat, sehingga tujuan zakat sebagai instrumen keadilan.

Mempertimbangkan Peraturan Menteri Agama No 31 Tahun 2019 dan fatwa MUI berkaitan nisab zakat pendapatan dan jasa tidak menyebut spesifikasi kadar karat, sehingga diperlukan *bayan at-takhshish* untuk menjelaskan lebih lanjut kadar karat emas dalam kewajiban zakat pendapatan dan jasa dalam relevansinya terhadap realitas ekonomi terkini.

G. PENENTUAN NISAB: PERTIMBANGAN MASALIH AL-FUQARA WAL MASAKIN

Determinasi ambang batas (nisab) zakat harta merupakan domain ijtihadi yang bersifat khilafiyah (terdapat perbedaan pendapat) di kalangan fukaha kontemporer. Perdebatan ini berpusat pada pemilihan standar nilai yang paling relevan antara emas dan perak sebagai acuan kewajiban zakat mal, khususnya untuk aset tunai dan perdagangan.



Gambar 5. Dr. Shawqi Allam

Sumber : <https://youtu.be/V9HzdpQPA-g>

Fatwa Kontemporer Mufti Dar Al-Ifta Mesir, Dr. Shawqi Allam, memberikan ijtihad menyebutkan bahwa zakat emas ditetapkan sebesar 2,5% dari nilainya untuk setiap 85 gram atau lebih, namun dengan menggunakan standar jenis emas kadar 21 karat. Tatkala ditanya mengapa menggunakan emas 21 karat, diantara jawabannya karena menjaga keseimbangan antara al-Ghany (muzaki) dan Al-Fakir (mustahik fakir miskin)- (<https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa>).

“Fatwa mengenai pemilihan emas 21 karat untuk menghitung nisab zakat—bukan 18 atau 24 karat—muncul karena mempertimbangkan apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat ('urf). Hal ini sesuai dengan pendapat sekelompok fukaha dan selaras dengan maksud syariat dalam menjaga kemaslahatan orang kaya (muzakki) dan orang miskin (mustahik) secara seimbang.”



Gambar 6. Penjelasan Prof. Dr. Sulaiman Ar-Rahily

Sumber : <https://youtu.be/WDecDricsIs?si=iJEN0C61oTv9yqpN>

Prof. Dr. Sulaiman Ar-Rahily ketika ditanya, antara emas dan perak mana acuan nisab yang sebaiknya digunakan? Beliau menjelaskan carilah yang paling disukai fakir miskin, dengan demikian yang paling disukai fakir miskin yaitu Perak. Penggunaan standar perak merupakan pendapat populer karena nilainya yang lebih rendah (sehingga memperluas cakupan kewajiban zakat), tetapi hal ini tidak fair karena boleh jadi mereka yang fakir akan terkena kewajiban zakat dengan nilai perak. Oleh karena itu, beliau cenderung pada pendapat bahwa nisab mata uang harus dikonversikan ke dalam standar emas karena karakteristiknya yang lebih stabil dalam merepresentasikan batas minimum kekayaan seseorang. Secara teknis, beliau menetapkan ambang batas setara dengan 85 gram emas dengan kadar menengah (21 karat). Apabila aset seseorang telah mencapai ekuivalensi nilai tersebut dan telah memenuhi syarat haul, maka kewajiban zakat secara syar'i mulai berlaku.



Gambar 7. Penjelasan Prof. Dr. Saad Al-Khathlan

Sumber : <https://youtu.be/HJ-y2fY2KtU>

Begitu juga, Prof. Dr. Saad Al-Khathlan ketika ditanya standar nisab mana yang digunakan antara Emas dan Perak? beliau memaparkan adanya tiga pendapat terkait penetapan nisab kedua tersebut: mengacu pada emas, mengacu pada perak, atau mengambil nilai kurs terendah di antara keduanya. Dalam tinjauan beliau, pendapat yang dipandang lebih kuat (rajih) adalah menetapkan nisab berdasarkan nilai yang paling rendah, yaitu perak (fiddah). Argumentasi utamanya adalah untuk memproteksi kepentingan kaum dhuafa dengan cara mempercepat dan memperbesar volume dana zakat yang terkumpul.



ما هو نصاب الأوراق المالية هل بالذهب أم بالفضة؟



Gambar 8. Penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin

Sumber : <https://youtu.be/HGRBKlbdHuc?si=REK0XcwuldtbIKbg>

Syekh Ibnu Utsaimin ketika ditanya nisab mana yang hendaknya dipakai dalam standar uang saat ini, antara emas dan perak? Beliau menekankan bahwa prinsip disukai fuqara (yang paling dicintai bagi fakir) sangat relevan dalam konteks barang dagangan ('urudh at-tijarah) dan aset yang nilainya dihitung berdasarkan konversi mata uang. Beliau menjelaskan bahwa jika zakat dikenakan pada jenis harta dalam wujud aslinya ('ainul mal seperti emas atau perak fisik), maka penilaian dilakukan secara terpisah sesuai jenisnya. Namun, dalam urusan barang dagangan, penilaian nisab harus mempertimbangkan kemaslahatan fakir miskin dengan mengambil nilai yang paling menguntungkan bagi mereka (biasanya standar perak karena lebih rendah). Meskipun pada umumnya nilai emas lebih dominan dan tinggi, penggunaan standar yang mencapai nisab lebih awal dipandang lebih mengutamakan hak-hak mustahik.

UU 23 Tahun 2011: Prinsip Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pada praktiknya, Majelis Ulama Indonesia juga merujuk pada standar 85 gram emas secara fiqih, namun perbedaan nominal dapat muncul akibat penggunaan jenis emas yang berbeda, termasuk kemungkinan merujuk pada emas berkadar lebih tinggi (misalnya 24 karat) atau harga pasar dengan waktu pembaruan yang tidak sama. Selain itu, pilihan menggunakan standar emas atau perak turut memengaruhi besaran nisab secara signifikan. Standar perak menghasilkan ambang batas yang jauh lebih rendah dibandingkan emas, sehingga memperluas jumlah individu yang termasuk kategori wajib zakat. Dengan

demikian, variasi angka tersebut lebih tepat dipahami sebagai hasil ijtihad kebijakan dan pertimbangan maslahat dalam konteks ekonomi modern, bukan sebagai perbedaan prinsip hukum yang mendasar.

Dalam konteks Indonesia, kerangka ijtihad tersebut kemudian dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan berdasarkan asas syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Artinya, sekalipun terdapat variasi dalam aspek teknis seperti konversi harga emas atau pilihan standar emas dan perak, keseluruhan praktiknya tetap harus berlandaskan prinsip syariah dan tata kelola yang profesional serta dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, Pasal 3 huruf (b) menegaskan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, diskursus mengenai standar nisab dan metodologi perhitungannya tidak berhenti pada aspek normatif semata, tetapi diarahkan pada bagaimana zakat dapat dioptimalkan sebagai instrumen distribusi kekayaan dan kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

H. STANDAR KELAYAKAN HIDUP DI INDONESIA

Penentuan batas “standar mampu” dalam konteks zakat di Indonesia memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara indikator kesejahteraan nasional dan standar kecukupan syariah. Dalam praktiknya, terdapat beberapa standar rujukan utama yang dapat digunakan, yaitu garis kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS), standar kebutuhan hidup layak Had Kifayah, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), serta tingkat upah minimum provinsi (UMP) sebagai standar pendapatan pekerja formal.

Menurut BPS, garis kemiskinan merupakan batas minimum pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Penduduk dengan pengeluaran per kapita di atas garis kemiskinan dikategorikan tidak miskin. Pada tahun 2025, garis kemiskinan per rumah tangga pada September 2025 adalah sebesar Rp3.053.269,00/bulan sedangkan untuk perorangan pada kisaran sekitar Rp641.443,00/kapita/bulan. Dengan demikian, individu dengan pendapatan di atas nilai tersebut secara statistik telah keluar dari kemiskinan, namun belum tentu mencapai tingkat kecukupan hidup yang layak.

Dalam perspektif Had Kifayah, yaitu standar kecukupan kebutuhan dasar individu atau keluarga yang mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi sesuai kondisi wilayah dan jumlah tanggungan. Nilai rata-rata Had Kifayah di Indonesia mencapai Rp4.615.749,00 per keluarga setiap bulannya, dengan Had Kifayah perorangan sebesar Rp979.989,00 per kapita per bulan. Individu atau rumah tangga dengan

pendapatan di atas Had Kifayah dikategorikan telah mampu secara syariah dan tidak lagi termasuk mustahik.

Sementara itu, dalam sistem perpajakan Indonesia, kemampuan ekonomi warga negara diukur melalui ambang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan turunannya, PTKP untuk wajib pajak orang pribadi lajang (TK/0) sebesar Rp54 juta per tahun atau sekitar Rp4,5 juta per bulan. Penghasilan di atas PTKP menunjukkan adanya kapasitas ekonomis untuk berkontribusi kepada negara melalui pajak. Secara konseptual, PTKP merepresentasikan batas kemampuan ekonomi minimum warga negara, yang secara empiris nilainya relatif sejalan dengan Had Kifayah rata-rata nasional.

Untuk menentukan batas kebutuhan pokok secara operasional, Upah Minimum Regional/Provinsi/Kabupaten/Kota (UMR/UMP/UMK) dapat digunakan sebagai indikator standar pendapatan minimum pekerja formal yang merefleksikan kebutuhan hidup layak di suatu wilayah. Standar ini bersifat kontekstual karena ditetapkan berdasarkan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta kondisi ekonomi daerah.

Jika dibandingkan dengan standar ketenagakerjaan, Upah Minimum Provinsi (UMP) tertinggi di Indonesia berada di Provinsi wilayah DKI Jakarta, yang pada tahun 2026 telah mencapai sekitar Rp5,73 juta per bulan. Nilai ini berada di atas PTKP dan Had Kifayah rata-rata nasional, sehingga pekerja dengan pendapatan setara UMP tertinggi dapat dikategorikan memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang jelas berada pada kelompok mampu.

Tabel 3. Perbandingan Pendapatan Per Kapita dengan Upah Minimum Nasional

Tahun	PDB Per Kapita (Juta Rp/Tahun)	Pertumbuhan PDB Per Kapita	PDB Per Kapita (Juta Rp/Bulan)*	UMN (Upah Minimum Nasional) (Rp)	Kenaikan UMN (Upah Minimum Nasional)
2021	Rp62,2 Juta	8,5%	Rp5.183.333	Rp2.687.723	1,09%
2022	Rp71,0 Juta	14,1%	Rp5.916.667	Rp2.729.436	1,09%
2023	Rp75,0 Juta	5,6%	Rp6.250.000	Rp2.923.309	7,50%
2024	Rp79,5 Juta	6,0%	Rp6.625.000	Rp3.113.360	3,60%
2025	Rp83,7 juta	5,3%	Rp6.975.000	Rp3.315.728	6,50%

*PDB Per Kapita bulanan mencerminkan nilai ekonomi yang dihasilkan per orang di Indonesia jika seluruh kekayaan nasional dibagi rata.

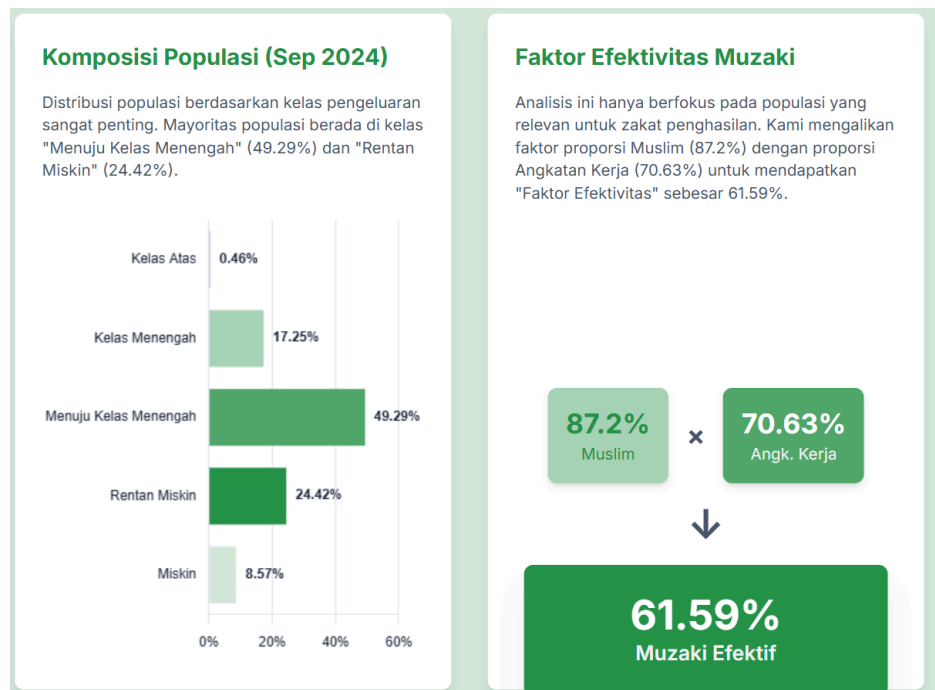
Sumber: BPS dan Kemnaker, diolah

Berdasarkan tabel tersebut, standar kemampuan orang Indonesia berada pada rentang Rp3.315.728-Rp6.975.000. Pekerja dengan upah UMP secara teknis masih dikategorikan sebagai kelompok yang dibantu, bukan yang wajib memberi zakat. Secara kolektif, kemampuan rata-rata penduduk Indonesia sudah sangat dekat dengan batas

nishab zakat. Ini menandakan Indonesia sedang bertransisi menuju negara berpenghasilan menengah atas (Upper-Middle Income Country).

I. DAKWAH ZAKAT DAN KEMASLAHATAN MUZAKI MUSTAHIK

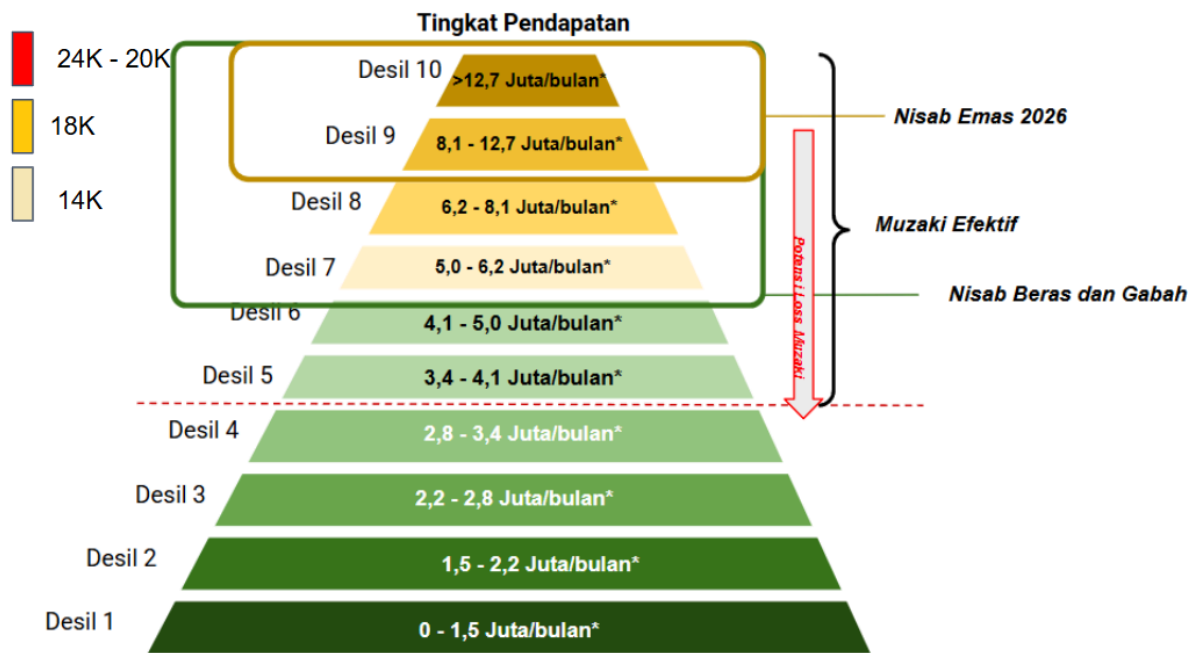
Pemilihan standar nisab memiliki dampak langsung terhadap jumlah muzaki yang teridentifikasi. Analisis ini memprediksi potensi muzaki efektif yaitu individu Muslim yang termasuk angkatan kerja saat beralih dari standar nisab terendah (perak) ke standar yang lebih tinggi (Gabah/Beras atau Emas 24K). Analisis ini hanya berfokus pada populasi yang relevan untuk zakat pendapatan dan jasa yaitu dengan mengalikan faktor proporsi Muslim (87,2%) dengan proporsi Angkatan Kerja (70,63%) untuk mendapatkan "Faktor Efektivitas" sebesar 61,59%.



Gambar 9. Asumsi Proyeksi Segmen Wajib Zakat berdasarkan Nisab

Sumber: Peneliti DKPN, 2025

Analisis dimulai dengan data komposisi populasi per September 2024, yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia terkonsentrasi di segmen "Menuju Kelas Menengah" (49,29%) dan "Rentan Miskin" (24,42%). Perbandingan standar nisab bulanan menunjukkan disparitas yang tajam antara standar terendah, Nisab Perak (Rp 1,42 juta), dengan standar yang lebih tinggi seperti Nisab Gabah/Beras (mulai dari Rp 4,19 juta) dan Nisab Emas (mulai dari Rp 8,9 juta).



Gambar 10. Desil Penduduk Indonesia (berdasarkan Pendapatan)

Sumber: Peneliti DKPN, 2025

Kesenjangan parameter ini memicu terjadinya penyusutan basis partisipasi yang signifikan dalam dua skenario utama: pertama, transisi dari standar Nisab Perak ke Nisab Gabah/Beras secara sistematis mengeksklusi segmen populasi "Rentan Miskin" (24,42% dari populasi). Jika ditinjau dari parameter efektivitas, kebijakan ini berimplikasi pada hilangnya sekitar 15,04% dari total basis muzaki efektif yang selama ini menjadi penopang stabilitas perolehan zakat. Kedua, dampak yang jauh lebih drastis muncul apabila standar yang diterapkan beralih ke Nisab Emas 24k. Skenario ini tidak hanya mengeliminasi kelompok "Rentan Miskin" (24,42%) tetapi juga menyapu bersih segmen "Menuju Kelas Menengah" (49,29%). Akumulasi dari kedua kelompok ini mencakup 73,71% dari total populasi nasional, yang secara kalkulatif memprediksi terjadinya erosi masif sebesar 45,40% pada basis muzaki efektif. Fenomena ini menandakan terjadinya reorientasi radikal dalam ekosistem zakat, di mana cakupan jangkauan filantropi Islam mengalami penyempitan yang sangat signifikan.

Implikasi dari simulasi di atas tidak hanya berhenti pada berkurangnya partisipasi pembayar zakat (muzaki), tetapi juga menciptakan risiko sistemik berupa ketidakcukupan sumber daya (*resource insufficiency*) bagi para penerima zakat (mustahik). Dalam konteks ekonomi makro, penggunaan emas sebagai standar nisab menciptakan kesenjangan antara ketersediaan dana bantuan dengan kebutuhan riil masyarakat (Qardawi, 1999). Secara performa ekonomi, hal ini mengakibatkan jumlah dana yang terkumpul tidak lagi mampu mengimbangi laju pertumbuhan kebutuhan mustahik. Penurunan dana zakat di tengah

stagnasi ekonomi atau krisis justru berisiko memperlebar jurang kemiskinan, karena instrumen jaring pengaman sosial (*social safety net*) dari zakat kehilangan daya gedornya (Hafidhuddin, 2002).

Sebagai bagian dari upaya memantau kemiskinan secara global, World Bank memperbarui garis kemiskinan internasional pada tahun 2024. Berdasarkan standar terbaru tersebut, sekitar 5,4 persen penduduk Indonesia masih berada dalam kategori miskin ekstrem. Jika menggunakan standar negara berpendapatan menengah bawah (LMIC), angkanya mencapai 19,9 persen, dan bahkan 68,3 persen apabila memakai standar negara berpendapatan menengah atas (UMIC). Sementara itu, menurut garis kemiskinan nasional, tingkat kemiskinan Indonesia tercatat sebesar 8,25 persen pada September 2025. Angka ini memang menurun 0,22 poin persentase dibanding Maret 2025 dan turun 0,32 poin persentase dibanding September 2024. Namun secara jumlah, masih terdapat 23,36 juta penduduk miskin di Indonesia. Jumlah tersebut hanya berkurang 0,49 juta orang dari Maret 2025 dan 0,70 juta orang dari September 2024, sehingga skala kemiskinan tetap besar dalam konteks jumlah penduduk nasional. Selain itu, terdapat kelompok masyarakat rentan miskin yang jumlahnya jauh lebih besar daripada penduduk miskin resmi, yaitu mereka yang berada sedikit di atas garis kemiskinan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah membuat kemajuan dalam menurunkan kemiskinan, jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi rentan masih besar, terutama ketika diukur dengan standar kesejahteraan yang lebih tinggi.

Dalam hal permasalahan kemiskinan, zakat mempunyai peranan yang penting secara nasional. Tujuan pengelolaan zakat secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada Pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Ketentuan ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam sistem kesejahteraan sosial nasional yang diarahkan secara langsung untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

J. MUSYAWARAH NISAB PENDAPATAN DAN JASA 2026

Sidang Musyawarah dan Diskusi Penetapan Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2026 diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional pada Jumat, 20 Februari 2026, bertempat di Aula Lantai 5 BAZNAS RI dan melalui Zoom Meeting.

Sidang dihadiri secara langsung oleh Pimpinan BAZNAS RI, antara lain Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA selaku Ketua BAZNAS, jajaran pimpinan BAZNAS lainnya, Prof. Dr. Irfan

Syauqi Beik, serta Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI Prof. Dr. H. Waryono. Forum juga dihadiri oleh ulama dan Sharia Advisor LAZ, di antaranya Dr. Oni Sahroni dari DPS LAZ IZI, perwakilan DPS LAZISMU, LAZ BMH, Rumah Zakat, dan LAZ ASFA, serta perwakilan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten Kota juga peserta yang hadir melalui zoom dari perwakilan MUI, Ormas Islam, dan BAZNAS Provinsi'Kabupaten'Kota serta LAZ dengan total lebih dari 500 peserta zoom (batas maksimal kapasitas zoom). Turut hadir para peneliti dan tim penyusun dari Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL BAZNAS RI.

Dalam forum tersebut, peserta membahas dinamika kenaikan harga emas, implikasi terhadap jumlah muzaki, serta kebutuhan adanya kepastian nasional agar tidak terjadi perbedaan penetapan di daerah. Berbagai pandangan disampaikan, mulai dari tetap menggunakan standar 85 gram emas murni sebagaimana mazhab syafii dan hanbali, namun banyak yang mengusulkan merujuk ke Ahnaf (mazhab hanafi) selama sudah melewati standar kelayakan hidup dan tidak kurang dari standar harga pangan, ada juga yang mengusulkan menggunakan pendekatan qiyas syabah zakat pertanian.

Setelah mempertimbangkan secara seksama, forum musyawarah tersebut merajihkan emas menurut pendapat ulama *ahnaf*. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan antaranya aspek kemaslahatan, stabilitas pengumpulan zakat, tidak bertentangan dengan PMA dan Fatwa MUI serta regulasi yang berlaku, sidang musyawarah menyepakati mengambil pendekatan *ahnaf* yang lebih moderat dan proporsional. Forum menyepakati bahwa nisab zakat pendapatan dan jasa Tahun 2026 merujuk pada nilai jenis emas (14 karat) untuk direkomendasikan dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua BAZNAS RI.

Berdasarkan perhitungan harga rata-rata emas selama tahun 2025, nisab zakat pendapatan dan jasa Tahun 2026 ditetapkan setara dengan nilai emas 14 karat sebesar kurang lebih Rp7,640,144 per bulan atau Rp. 91 juta dalam setahun, yakni meningkat 7% dari nisab tahun sebelumnya. Keputusan ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan muzaki dan kemaslahatan mustahik secara nasional. Kenaikan 7 persen tersebut juga selaras dengan kenaikan upah pada tahun yang sama yakni sebesar 6,17 persen, sehingga penyesuaian nisab tetap mempertimbangkan dinamika upah dan daya beli muzakki.

Tabel 4. Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa BAZNAS

Tahun	Nisab	Kenaikan	Dasar
2022	Rp6.607.748	-	SK Ketua BAZNAS Nomor 22 Tahun 2022
2023	Rp6.828.806	3,35%	SK Ketua BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023
2024	Rp6.859.394	0,45%	SK Ketua BAZNAS Nomor 1 Tahun 2024
2025	Rp7.140.498	4,10%	SK Ketua BAZNAS Nomor 13 Tahun 2025
2026*	Rp7.640.144	7%	-

Sumber: BAZNAS (diolah)

K. PILIHAN LAIN NISAB PENDAPATAN DAN JASA

Ketidakwajaran pergerakan harga emas dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa emas tidak lagi berfungsi sebagai alat ukur nilai yang stabil jika dibandingkan dengan mata uang (rupiah). Merujuk sistem ekonomi modern, emas telah bergeser menjadi komoditas finansial dan aset lindung nilai yang sangat dipengaruhi oleh spekulasi pasar, kebijakan moneter global, serta konsentrasi kepemilikan pada negara dan korporasi tertentu. Akibatnya, harga emas mengalami volatilitas harian yang tinggi dan membentuk tren jangka panjang yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil masyarakat. Ketika emas tetap digunakan sebagai dasar penetapan nisab zakat pendapatan dan jasa, kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan dalam praktik penunaian zakat.

Nisab zakat pada hakikatnya berfungsi sebagai batas keadilan agar kewajiban zakat hanya dikenakan kepada individu yang telah mencapai tingkat kecukupan ekonomi. Kenaikan nisab berbasis emas yang terus menerus berpotensi menggeser kelompok berpenghasilan menengah keluar dari kewajiban zakat, padahal secara kemampuan ekonomi mereka telah layak berkontribusi. Situasi ini melemahkan fungsi redistributif zakat dan berisiko mempersempit basis muzaki dalam jangka panjang. Terdapat dua usulan alternatif nisab zakat.

1. Penggunaan Qiyas Syabah

Dalam konteks Indonesia, harga pangan, khususnya beras sebagai kebutuhan pokok utama, lebih merepresentasikan tingkat kesejahteraan riil dan biaya hidup masyarakat. Fluktuasi harga pangan memiliki keterkaitan langsung dengan daya beli rumah tangga dan kebutuhan dasar umat. Oleh karena itu, penggunaan harga pangan sebagai dasar nisab zakat pendapatan dan jasa dinilai lebih kontekstual, terukur, dan relevan dengan realitas sosial ekonomi nasional. Pendekatan ini juga sejalan dengan regulasi yang telah ditetapkan dalam PMA Nomor 52 Tahun 2014 yang menggunakan nisab zakat pertanian sebagai

rujukan.

Secara fiqh, pendekatan tersebut bertumpu pada qiyas syabah, yaitu metode analogi hukum dengan mempertimbangkan kesamaan beberapa karakteristik utama. Pendapatan dan jasa yang diterima oleh mayoritas umat Islam di Indonesia bersifat mal al-mustafad, yaitu harta yang diperoleh secara periodik dan menambah kekayaan secara independen. Karakter ini memiliki kesamaan dengan hasil zakat zira'ah yang dikenakan setiap kali panen tanpa menunggu haul. Kesamaan illat inilah yang menjadi dasar analogi penetapan nisab pendapatan dengan nisab zakat pertanian.

Namun, karena bentuk harta yang diterima adalah uang, maka kadar zakatnya disesuaikan dengan ketentuan zakat nuqud, yaitu sebesar 2,5 persen. Pendekatan ini menjaga konsistensi fiqh dengan membedakan antara dasar nisab dan kadar zakat berdasarkan karakteristik harta. Dengan demikian, qiyas syabah tidak mencampurkan ketentuan, tetapi justru mengintegrasikan dua rujukan fiqh secara proporsional.

atau dirham sebesar 2,5%

Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa

اختلاف الفقهاء الموجبون في تحديد قيمة النصاب فيها إلى ثلاثة أقوال

الأول: اعتبار نصابها بنصاب الزروع والثمار؛ فمن بلغ دخله ما قيمته خمسة أوسق، أو خمسين كيلة مصرية أو (653 كيلو جرام وزناً من أدنى ما تخرجه الأرض كالشعير)؛ وجبت عليه الزكاة

وعلة ذلك: أن كسب العمل إيراد وثمره مباشرة للعمل، فيقاس على زكاة الزروع والثمار

Para ulama yang mengharuskan zakat berbeda pendapat dalam menentukan nilai nisabnya menjadi tiga pendapat:

Pertama: Menganggap nisabnya sama dengan nisab tanaman dan buah-buahan; maka siapa yang penghasilannya mencapai lima wasq, atau lima puluh kilo Mesir atau (653 kilogram dari hasil bumi yang paling rendah seperti gandum), maka ia wajib membayar zakat.

Alasannya: penghasilan dari pekerjaan adalah hasil langsung dari pekerjaan tersebut, sehingga diukur berdasarkan zakat tanaman dan buah-buahan.

الثاني: اعتبار نصابها نصاب النقود

وحُدُّه بما قيمته 85 جراماً من الذهب، أي: ما يساوي عشرين مثقالاً، أو (200) درهم من الفضة؛ وذلك لأن الناس يقبضون رواتبهم وأجورهم وإيراداتهم بالنقود؛ فالأولى أن يكون المعتبر هو نصاب النقود

الثالث: اعتبار نصاب الرواتب والأجور على نصاب النقود

أي ما يعادل 85 جراماً من ذهب، أو 200 درهم من الفضة، واعتبار نصاب إيرادات المهن الحرة على الزروع والثمار؛ (فيكون نصابها ما يعادل قيمته خمس أوسق، أو (50 كيلة مصرية)، أو (653 كيلو جرام وزناً من أدنى ما تخرجه الأرض كالشعير

Kedua: Menganggap nisabnya sama dengan nisab uang

Menetapkannya sebesar 85 gram emas, yaitu: setara dengan dua puluh mitsqal, atau (200) dirham perak; karena orang-orang menerima gaji, upah, dan pendapatan mereka dalam bentuk uang; maka yang lebih tepat adalah menganggap nisab uang sebagai nisab yang berlaku.

Ketiga: Menganggap batas minimum gaji dan upah sama dengan batas minimum uang: yaitu setara dengan 85 gram emas, atau 200 dirham perak, dan menganggap nisab pendapatan dari pekerjaan bebas berdasarkan hasil panen dan buah-buahan; sehingga nisabnya setara dengan nilai lima wasq, atau (50 kilo Mesir), atau 653 kilogram dari hasil bumi yang paling rendah seperti gandum. (Referensi: Zakat atas Gaji, Upah, dan Pekerjaan Bebas, Jurnal Universitas King Saud, Volume 14, Halaman 704-675) (Syahatah).

Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Berdasarkan hasil pertanian Pendapat Syaikh Muhammad Ghazali (1917-1997)



Gambar 11. Buku Al-Ghazali

Sumber: Al-Ghazali, Islam dan Kondisi Ekonomi

يقول الشيخ محمد الغزالي: "إن مَنْ دخله لا يقل عن دخل الفلاح الذي تجب عليه الزكاة يجب أن يخرج زكاة؛ فالطبيب، والمحامي، والمهندس، والصانع، وطوائف المحترفين والموظفين وأشباههم تجب عليهم الزكاة، ولا بد أن تُخرج من دخلهم الكبير، ولنا على ذلك دليلان

Syekh Muhammad al-Ghazali berkata: "Barangsiapa yang penghasilannya tidak kurang dari penghasilan petani yang wajib membayar zakat, maka ia wajib membayar zakat; sehingga dokter, pengacara, insinyur, pengrajin, para profesional, pegawai, dan sejenisnya wajib membayar zakat, dan zakat tersebut harus diambil dari penghasilan besar mereka. (Referensi: (الغزالي، الإسلام والأوضاع الاقتصادية) / Al-Ghazali, Islam dan Kondisi Ekonomi).

Kami memiliki dua dalil untuk hal ini:

الأول: عموم النص في قول القرآن الكريم: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) [البقرة: 267]. ولا شك أن كسب الطبقات الأنفة الذكر كسب طيب يجب الإنفاق منه.

والدليل الثاني: أن الإسلام لا يتصور في حقه أن يفرض الزكاة على فلاح يملك خمسة أفدنة، ويترك صاحب عمارة تدرّ عليه مقدار محصول خمسين فداناً، أو يترك طبيباً يكسب من عيادته في اليوم الواحد ما يكسبه الفلاح في عام طويل من أرضه، إذا !!! أعلّت بضعة أرادب من القمح، ضربت عليه الزكاة يوم حصاده.

Pertama: Makna umum dari ayat Al-Qur'an: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ) [البقرة: 267]. Tidak diragukan lagi bahwa penghasilan dari kelas-kelas yang disebutkan di atas adalah penghasilan yang baik yang harus dibelanjakan.

Bukti kedua: Islam tidak mungkin mewajibkan zakat kepada seorang petani yang memiliki lima hektar tanah, tetapi membiarkan pemilik gedung yang menghasilkan panen sebesar lima puluh hektar, atau membiarkan seorang dokter yang memperoleh penghasilan dari praktiknya setiap hari sebesar penghasilan petani dari tanahnya selama setahun, jika tanahnya menghasilkan beberapa karung gandum, zakat dikenakan padanya pada hari panennya!! (Referensi: (الغزالي، الإسلام والأوضاع الاقتصادية) / Al-Ghazali, Islam dan Kondisi Ekonomi).

" والزكاة في هذه الصورة قد اعتبرت على أساس الدخل الناتج، مر عليه العام أو لم يمر، ولا عبرة فيها

برأس المال المغل- وهو الأرض المزروعة، قلت قيمتها أو عظمت ومن هنا نستطيع الحكم بأن قاعدة فرض الزكاة في الإسلام،

قد تكون رأس المال، وقد تكون مقدار الدخل، ونخلص من هذا إلى أن من له دخل لا يقل عن دخل الفلاح، الذي تجب عليه الزكاة،

يجب أن يخرج زكاة مساوية، ولا عبرة البتة، برأس المال، ولا بما يتبعه من شروط.

" فالطبيب والمحامي والمهندس والصانع وطوائف المحترفين والموظفين وأشباههم تجب عليهم زكاة، ولا بد أن تخرج من دخلهم الكبير.

"Dan zakat dalam bentuk ini dianggap berdasarkan pendapatan yang dihasilkan, baik yang telah berlalu setahun maupun belum, dan tidak ada hubungannya dengan modal tetap, yaitu tanah yang ditanami, baik nilainya turun maupun naik. Dari sini kita dapat menyimpulkan

bahwa dasar pengenaan zakat dalam Islam dapat berupa modal, dan dapat berupa jumlah pendapatan. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa siapa pun yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan petani, yang wajib membayar zakat, harus membayar zakat yang setara, tanpa memperhitungkan modal atau persyaratan lainnya.

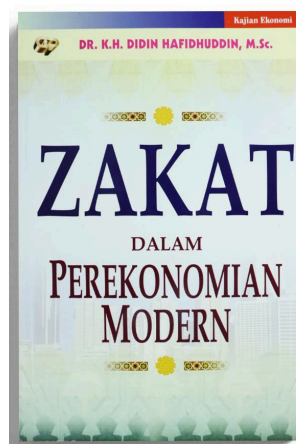
"Dokter, pengacara, insinyur, pabrikan, para profesional, pegawai, dan sejenisnya wajib membayar zakat, dan zakat tersebut harus dikeluarkan dari pendapatan besar mereka (*Al-Islam wa Al-Audha' Al-Iqtishadiyah Hal 118*).

Kadar Zakat Pendapatan dan Jasa: 10%, 5%, atau 2,5%

ذهب معظم الفقهاء المعاصرين إلى أن القدر الواجب في زكاة الرواتب والأجور وإيرادات المهن الحرة، هو ربع العُشر فقط؛ عملاً بالنصوص التي أوجبت في النقود ربع العُشر؛ ولأن دخل الفرد يعتمد على العمل وحده، ومن ثَمَّ وجب تخفيف الزكاة عليه؛ رعاية للطبقات العاملة، واستئناساً بما عمل به ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز - رضي الله عنهما - من اقتطاع الزكاة من العطاء إذا أعطوه، من كل ألف خمسة وعشرين

Sebagian besar ulama kontemporer berpendapat bahwa zakat yang wajib dibayarkan atas gaji, upah, dan pendapatan dari pekerjaan bebas adalah seperempat dari sepersepuluh; sesuai dengan teks-teks yang mewajibkan zakat seperempat dari sepersepuluh atas uang; Dan karena penghasilan seseorang bergantung pada pekerjaannya saja, maka zakatnya harus diringkankan; untuk memperhatikan kelas pekerja, dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibn Mas'ud dan Umar bin Abdul Aziz - semoga Allah meridhai mereka - yaitu memotong zakat dari pemberian jika mereka memberikannya, yaitu seperempat dari setiap seribu. (Referensi: Zakat atas Gaji, Upah, dan Pekerjaan Bebas, Jurnal Universitas King Saud, Volume 14, Hal 675-704).

Metode Penetapan Zakat Pendapatan dan Jasa (Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin)



Gambar 12. Buku Zakat Dalam Perekonomian Modern

Sumber: Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern

Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat pendapatan dan jasa dapat dibandingkan dengan dua hal secara bersamaan berdasarkan qiyas syabah, yaitu zakat pertanian dalam segi nisab dan zakat emas dan perak dalam segi kadarnya. Dalam segi nisab, sebanding dengan zakat pertanian, yang terdiri dari 653 kg beras dan diberikan pada saat diterima. Sehingga berdampak pada tidak adanya ketentuan *haul*. Dalam segi zakat, dapat disamakan dengan zakat uang (*nuqud*), karena gaji, honorarium, upah, dan pembayaran lainnya yang sering dilakukan dalam bentuk uang. kadar zakatnya adalah *rub'ul usyri*, atau 2,5 persen. Referensi: *Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 98.*

Dasar penggunaan qiyas syabah, sebagaimana di atas, pernah dipraktikkan oleh sahabat Nabi yaitu Ibnu Mas'ud (596 M - 653 M). Dalam Kitab al-Amwal, Hubairah bin Barim juga pernah berkata bahwa Ibnu Mas'ud ra pernah memberikannya upah dalam kantong-kantong kecil berisi uang, kemudian mengambil zakat darinya.

كان ابن مسعود يزكي أعطياهم من كل ألف خمسة وعشرين

Artinya: “*la menambahkan bahwa Ibnu Mas'ud mengeluarkan zakat dari penghasilan mereka sebesar 25 dari setiap 1000.*”

Praktik penggunaan qiyas syabah juga dilakukan oleh Pengelola Zakat yang ada di Indonesia, di antaranya adalah:

Tabel 5. Praktik Zakat Pendapatan dan Jasa dengan Nisab Bahan Pangan

No	Lembaga Zakat	Provinsi	Praktik Qiyah Syabah
1	BAZNAS Kabupaten Lombok Tengah	NTB	BAZNAS Lombok Tengah menggunakan standar 653 kilogram gabah dengan kadar 2,5% sesuai SK Ketua BAZNAS Lombok Tengah Tahun 2023. Praktik ini berjalan sejak penerapan pemotongan zakat ASN melalui SP2D pada tahun 2017, setelah pembentukan BAZNAS Lombok Tengah pada 2016 dan terbitnya peraturan bupati tentang zakat pendapatan dan jasa ASN. Dengan kondisi masyarakat yang didominasi petani dan UMR yang relatif rendah, penggunaan nisab emas dinilai tidak relevan karena membuat banyak ASN tidak memenuhi nisab, sehingga standar gabah dipilih agar kewajiban zakat lebih adil dan kontekstual.
2	BAZNAS Kabupaten Dompu	NTB	BAZNAS Dompu menetapkan nisab zakat pendapatan dan jasa dengan pendekatan Qiyas Syabah menggunakan standar 653 kilogram padi dengan kadar zakat 2,5 persen. Perhitungan dilakukan secara akumulatif dalam satu tahun dan disetarakan dengan nisab zakat pertanian, sehingga ketentuan ini khusus diterapkan untuk zakat pendapatan dan jasa.
3	BAZNAS Provinsi Bengkulu	Bengkulu	BAZNAS Prov Bengkulu menetapkan nisab sebesar 653 kilogram gabah dengan harga saat ini Rp6.500 per kilogram, dengan kadar zakat 2,5 persen. Pilihan ini diambil karena

No	Lembaga Zakat	Provinsi	Praktik Qiyah Syabah
			penggunaan nisab emas dengan harga saat ini menempatkan ambang kewajiban zakat di atas Rp15 juta per bulan sehingga hanya sedikit ASN dan pekerja formal yang memenuhi nisab. Kenaikan harga emas yang jauh lebih cepat dibanding kenaikan UMP dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil masyarakat Bengkulu. Atas dasar kemaslahatan mustahik dan keadilan, BAZNAS Bengkulu tetap menggunakan standar gabah.
4	BAZNAS Kab Bulukumba	Sulawesi Selatan	Standar nisab zakat pendapatan dan jasa dengan pendekatan Qiyas Syabah sejak terbitnya Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 47 Tahun 2016. Ketentuan ini diperkuat melalui Surat Keputusan BAZNAS Kabupaten Bulukumba Nomor Kpts-Pim.005/BAZNAS-BLK/I/2024 tentang penetapan nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2024. Nisab ditetapkan setara dengan 653 kilogram gabah atau 523 kilogram beras, dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen.
5	BAZNAS Provinsi NTB	NTB	BAZNAS Provinsi NTB menetapkan nisab zakat pendapatan dan jasa dengan pendekatan Qiyas Syabah sejak diberlakukannya peraturan daerah dan peraturan gubernur yang mengatur pengelolaan zakat di daerah. Sejak awal BAZNAS Provinsi NTB belum pernah menggunakan nisab emas dalam penetapan kewajiban zakat pendapatan dan jasa.

Sumber: Diolah peneliti, 2026

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi pada tingkat Peraturan Menteri Agama (PMA) kedepan terkait implementasi Nisab Qiyas Syabah dalam zakat pendapatan. Mengingat secara historis PMA pada mulanya mengadopsi standar nisab zakat pertanian, maka nantinya regulasi tersebut diharapkan tidak lagi bersifat kaku atau hanya terpaku pada satu standar tunggal. Dengan mempertimbangkan berbagai pendapat ulama serta praktek beberapa daerah yang telah menerapkan Qiyas Syabah, maka penambahan standar pilihan nisab zakat pada PMA menjadi solusi moderat untuk memperluas opsi standar nisab yang mencakup emas, perak, maupun pertanian (zиро'ah). Pendekatan ini akan memastikan kebijakan zakat tetap relevan, adaptif terhadap kondisi ekonomi yang dinamis, dan memberikan kepastian hukum yang lebih berkeadilan bagi muzaki di berbagai wilayah.

2. Usulan Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Berbasis Standar Perak

Penetapan nisab zakat pendapatan secara syariat tidak hanya terpaku pada standar emas, melainkan juga dapat merujuk pada standar perak sebagai alternatif yang sah. Hal ini selaras dengan paparan Dr. Yuli Yasin pada Muzakarah the 9th ICONZ tahun 2025 lalu, yang menilai bahwa penggunaan standar emas 85 gram sebagai dasar nisab zakat pendapatan dan jasa dinilai perlu ditinjau ulang dalam konteks ekonomi Indonesia saat ini.

Kenaikan harga emas yang sangat tajam telah mendorong ambang nisab ke tingkat yang relatif tinggi dibandingkan dengan struktur pendapatan masyarakat. Akibatnya, kewajiban zakat menjadi semakin terbatas hanya pada kelompok berpendapatan tinggi, sementara kelompok menengah yang secara kemampuan ekonomi telah layak berbagi justru tidak mencapai batas nisab.

Sebagai alternatif, Dr. Yuli Yasin mengusulkan penggunaan standar perak sebagai dasar penentuan nisab zakat pendapatan dan jasa. Dalam khazanah fikih, perak (595 gram) juga merupakan standar moneter yang sah dan digunakan dalam penetapan nisab. Dengan nilai perak yang relatif lebih rendah dibanding emas, ambang nisab yang dihasilkan menjadi lebih realistis dan kontekstual dengan daya beli masyarakat Indonesia.

Untuk mengoperasionalkan nisab perak yang berkeadilan, Dr Yuli mengusulkan untuk ditambah dengan kebutuhan pokok sehingga nisabnya menjadi Perak + Kebutuhan Pokok, Kebutuhan pokok yang dimaksud tersebut mengacu ke standar Upah Minimum Regional/Kota/Kabupaten (UMR/UMK) sebagai Pendapatan Tidak Kena Zakat (PTKZ).

L. KESIMPULAN

Berdasarkan landasan teologis, fikih, dan analisis ekonomi yang telah dipaparkan, penetapan nisab menggunakan emas karatase 14 karat dipandang paling moderat. Data proyeksi tahun 2026 menunjukkan disparitas yang sangat tajam jika tetap menggunakan standar emas 24 Karat. Pemilihan standar emas 14 karat ini didasarkan pada argumen bahwa secara substansi hukum, ia tetap memenuhi kriteria sebagai emas (*dzahab*) menurut logika dominasi unsur Mazhab Hanafi, sekaligus menawarkan titik temu nilai yang sangat identik dengan standar kebutuhan pokok. Selain itu, nisab zakat dengan *qiyas syabah* juga dapat menjadi alternatif untuk jangka panjang karena standarisasi harga pangan (*ziraah*) yang lebih stabil dan mencerminkan biaya hidup riil. Adapun tabel pilihan penetapan nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Usulan Penetapan Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2026

Harga rata-rata selama periode haul tahun 2025			Proyeksi Nisab	
			Pertahun	Perbulan
SK Ketua BAZNAS 2025			Rp85,685,972	Rp7,140,498
Usulan Tahun 2026	Standar Emas*	Antam (Rp.2,117,357/gram)	Rp179,975,311	Rp14,997,943
		24 Karat (Rp.1,807,337/gram)	Rp153,623,652	Rp12,801,971
		22 Karat (Rp.1,656,726/gram)	Rp140,821,680	Rp11,735,140

Harga rata-rata selama periode haul tahun 2025			Proyeksi Nisab	
			Pertahun	Perbulan
		21 Karat (Rp. 1,590,457/gram)	Rp135,188,813	Rp11,265,734
		16 Karat (Rp. 1,279,956/gram)	Rp108,796,270	Rp9,066,356
		14 Karat (1,078,609/gram)	Rp91,681,728	Rp7,640,144
	Standar Perak	Perak (Rp. 22,145/gram)	Rp29,605,415	Rp2,467,118
	Ziraah	Beras Premium (Rp 16,285/kg)	Rp102,400,080	Rp8,533,340
		Beras Medium (Rp 14,542/kg)	Rp91,440,096	Rp7,620,008
		Gabah Kering Giling (Rp. 8000/kg)	Rp62,688,000	Rp5,224,000

Sumber: Diolah peneliti, 2026

Dalam jangka pendek, penggunaan standar emas 14 karat ini menjadi solusi yang kredibel karena tetap memenuhi substansi hukum sebagai emas (*dzahab*) menurut logika dominasi unsur dalam Mazhab Hanafi, sekaligus telah sesuai dengan koridor regulasi PMA No. 52 Tahun 2014 dan Fatwa MUI. Penggunaan kadar ini dipandang lebih mencerminkan rasa keadilan sebagai negara berkembang dengan pendapatan rata-rata masyarakat sebesar Rp6,9 juta per bulan, sehingga muzaki tidak terbebani oleh volatilitas harga emas murni (24 karat) yang fluktuatif, sementara hak dasar mustahik tetap terlindungi.

Untuk jangka panjang, kajian ini merekomendasikan adanya penguatan regulasi pada tingkat Peraturan Menteri Agama (PMA). Diharapkan regulasi mendatang tidak bersifat kaku atau "mengunci" hanya pada satu standar tunggal, melainkan membuka opsi perluasan standar nisab yang mencakup emas, perak, maupun hasil pertanian (*zira'ah*). Transformasi menuju standar pertanian atau harga makanan pokok dinilai lebih relevan dengan jati diri Indonesia sebagai negara agraris untuk menjamin kemaslahatan program pengentasan fakir miskin.

Pertimbangann memasukan nisab perak sebagai salah satu pilihan standar nisab pada PMA ialah berkaca pada keberhasilan penerapannya di negara-negara seperti Pakistan dan Maroko. Hal ini penting untuk memastikan fungsi zakat sebagai jaring pengaman sosial tetap inklusif dan efektif dalam merespons dinamika zaman. Namun, dengan mempertimbangkan berbagai pendapat ulama serta praktik di beberapa daerah, penggunaan nisab perak ini harus dibarengi dengan instrumen Pendapatan Tidak Kena

Zakat (PTKZ). Penentuan PTKZ tersebut dapat mengacu pada UMR/UMK untuk menjaga keadilan bagi muzaki. Dengan adanya batasan PTKZ yang tepat, regulasi mendatang tidak akan bersifat kaku, melainkan tetap mampu melindungi kebutuhan dasar individu sebelum menetapkan kewajiban zakatnya.

REFERENSI

- Afghan Relief. (2025). Religious dues: Zakat calculation. <https://www.afghan-relief.org/>
- Ahmad, Abu Dawud, & al-Tirmidhi. (n.d.). Aku telah membebaskan kalian dari zakat atas kuda dan budak. Maka bayarlah zakat atas budak, satu dirham untuk setiap empat puluh dirham. In *Nayl al-Awtar* (Vol. 4, p. 731).
- Al-Hadramiyyah. (n.d.). *Al-Hadramiyyah* (p. 101).
- Al-Mughni. (n.d.). *Al-Mughni* (Vol. 3, p. 6).
- Al-Sharh al-Saghir. (n.d.). *Al-Sharh al-Saghir* (Vol. 1, p. 260).
- Al-Zuhayli, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Badan Pusat Statistik Malaysia (DOSM). (2024). Household income survey report: Malaysia & states 2024. <https://www.dosm.gov.my/>
- Badan Pusat Statistik Malaysia (DOSM). (2025). Penang's median monthly household income reaches RM7,386. Malay Mail. <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2025/10/13/dosm-penangs-median-monthly-household-income-reaches-rm7386-with-income-growth-outpacing-spending/194433>
- Bain, J. S. (1951). Relation of Profit Rate to Industry Concentration: American Manufacturing, 1936–1940. *The Quarterly Journal of Economics*, 65(3), 293-324.
- Bain, Joe S. (1956). *Barriers to New Competition*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bait Al-Zakat Sudan. (n.d.). UU Zakat Sudan. <https://baitalzakat.com/files/english-files/baitalzakat.com-E100234.pdf>
- Bampinas, G., & Panagiotidis, T. (2015). Are gold and silver a hedge against inflation? A two century perspective. *International Review of Financial Analysis*, 41, 267-276.
- Beckmann, J., & Czudaj, R. (2013). Gold as an inflation hedge in a time-varying coefficient framework. *The North American Journal of Economics and Finance*, 24, 208-222.
- Bettership. (2024). Average salary in Nigeria. <https://www.bettership.com/countries/nigeria/>
- Bullion Rates. (2026). Gold spot price in Yemen. <https://id.bullion-rates.com/gold/YER/>
- Chiang, T. C. (2022). Can gold or silver be used as a hedge against policy uncertainty and COVID-19 in the Chinese market?. *China Finance Review International*, 12(4), 571-600.
- City Population. (2025). Malaysia: Putrajaya administrative district statistics. <https://www.citypopulation.de/>
- Dar al-Ifta al-Misriyyah. (2025). Zakat guidelines and thresholds. <https://www.dar-al-ifta.org/en/>
- Emirates Islamic. (2025). Zakat calculator: Gold and silver. <https://www.emiratesislamic.ae/en/zakatcalculator>
- Faraj, B. A. A. S. (2018). Can gold act as a hedge against inflation? Evidence from Iraq (Master's thesis, Çankaya Üniversitesi).

- Gono, D. N., Napitupulu, H., & Firdaniza. (2023). Silver price forecasting using extreme gradient boosting (XGBoost) method. *Mathematics*, 11(18), 3813.
- GoodReturns. (2026). Live gold rates: India and international. <https://www.goodreturns.in/gold-rates/>
- Gulseven, O., & Ekici, O. (2021). The role of real estate and gold as inflation hedges: the Islamic influence. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(2), 391-408.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.
- Haneef, M. A. (1995). *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*. Alhoda.
- Hernández, Á. G. (Ed.). (2025). *Principios de bioquímica clínica y patología molecular*. Elsevier Health Sciences.
- Ibn Qudamah al-Maqdisi, Al-Mughni (n.d) *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah* (Vol. 2, p. 302) Beirut
- India Zakat. (2025). Zakat principles and India-specific guidelines. <https://indiazakat.com/>
- Ipsos Cambodia. (2022). Cambodia average salaries 2022 and urbanisation trends. <https://ips-cambodia.com/>
- ISEAS – Yusof Ishak Institute. (2024). The middle class in the Philippines: Trends and perspectives. <https://www.iseas.edu.sg/>
- Islamic Relief South Africa. (2025). Nisab and zakat calculator. <https://islamic-relief.org.za/zakat/calculator/>
- Kuwait Government. (2026). E-Services: Zakat for individuals. <https://e.gov.kw/>
- Leadership News. (2025). The disappearing middle class in Nigeria. <https://leadership.ng/>
- Lebanon Zakat Fund. (2025). Zakat rules and calculation. <https://www.zakat.org.lb/>
- Libya Review. (2025). Economy minister: 30% of Libya's population in poverty. <https://libyareview.com/>
- Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP). (2025). Nisab zakat 2025: Pulau Pinang. https://www.linkedin.com/posts/zakatmainpp_nisabzakat2025-nisabzakatpulaupinang-untuknegerikita-activity-7280559802479517696-6cTf
- Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS). (2025). Current and past nisab values. <https://www.zakat.sg/current-past-nisab-values/>
- Marits, N. A., & Herlina, M. (2025, August). Analisis Perbandingan Metode Grey dalam Meramalkan Harga Emas Tahun 2025-2027. In *Bandung Conference Series: Statistics* (Vol. 5, No. 2, pp. 577-586).
- Masarat. (2025). Zakat on Al-Mal in Kuwait and Libya. <https://masarat-sy.org/en/>
- MATW Project. (2025). Zakat calculator Bangladesh. <https://matwproject.org/zakat-calculator-bd>

- Ministry of Religious Affairs Brunei Darussalam. (2025). Pengumuman kadar nisab zakat. <https://www.mora.gov.bn/>
- Mufti of the Republic of Tunisia. (2026). Zakat threshold for Hijri year 1447. Tunisia Numerique. <https://news-tunisia.tunisienumerique.com/>
- Oyster HR. (2024). Average salary in Philippines. <https://www.oysterhr.com/library/average-salary-in-philippines>
- Price360. (2024). The rise of India's middle class. <https://www.price360.in/>
- Qardawi, Y. (1999). Fiqh al-Zakah. Mu'assasat al-Risalah.
- Remote People. (2024). Average salary by country: Morocco, Libya, and Brunei. <https://remotepeople.com/>
- Shariah Philippines. (2025). Zakat calculator. <https://shariah.com.ph/zakat-calculator>
- Sholiha, S., & Dewi, W. U. (2024). Penggunaan ARIMA Box-Jenskin dalam meramalkan harga emas Antam tahun 2025-2027 di Indonesia. *Sciencestatistics: Journal of Statistics, Probability, and Its Application*, 2(2), 59-69.
- StashAway. (2024). Average salary and median income in Singapore. <https://www.stashaway.sg/r/average-salary-median-income-singapore>
- State Information Service (SIS) Egypt. (2025). CAPMAS: Poverty rates in Egypt decline. <https://sis.gov.eg/en/>
- Takaful Cambodia. (2025). Zakat distribution and Sadaqah Jariyah. <https://www.takafulcambodia.org/>
- Talentnet Group. (2024). Average salary in Vietnam: Socio-economic insights. <https://www.talentnetgroup.com/vn/>
- Thai Embassy Riyadh. (2025). Muslims in Thailand. <https://riyadh.thaiembassy.org/>
- The Business Times. (2024). Are condo and car ownership getting harder? Singapore's upper-middle class. <https://www.businesstimes.com.sg/>
- Time Doctor. (2024). Average salary in Malaysia: A comprehensive guide. <https://www.timedoctor.com/blog/average-salary-in-malaysia/>
- Vietnam Briefing. (2024). Understanding Vietnam's middle class: Size and spending patterns. <https://www.vietnam-briefing.com/>
- World Population Review. (2025). Muslim population by country 2025. <https://worldpopulationreview.com/>
- Worldometers. (2026). GDP by country and population trends. <https://www.worldometers.info/>
- Yūsuf az-Zaila'i, J. a.-D. ' . b. (n.d.). Nashb ar-Rāyah fī Takhrīj Aḥādīth al-Hidāyah. <https://shamela.ws/book/8356/6147>
- Zakat Kedah. (2025). Kalkulator zakat online. <https://jom.zakatkedah.com.my/>

Zakat Selangor. (2025). Info semasa nisab emas dan perak.

<https://www.zakatselangor.com.my/>

Zamzam Foundation. (2025). Pay Zakat Somalia. <https://zamzamfoundation.org.uk/zakat/>

Lampiran

1. Dokumentasi Musyawarah Penetapan Nisab Zakat tahun 2026



Praktik Zakat di Berbagai Negara

Tabel 7. Praktik Zakat di Berbagai Negara

No	Negara	Negara Bagian	Nisab local currency	Setara berapa Rp/tahun	Setara berapa Rp/bulan	Estimasi Standar yang Digunakan	Keterangan Karatase	Avg Income (month)
1	Singapura 1\$ = Rp13.329,09		\$17,230	Rp228,969,470	Rp19,080,789	Emas 24K	Tahun 2026	\$5,775 SGD/Rp.76.727.227 (per month)
2	Malaysia 1RM = Rp4.291.70	Johor	RM 48,134.69	Rp205,642,262	Rp17,136,855	Emas 24K	Berdasarkan Estimasi Harga Emas dengan estimasi Harga Emas RM566.2	6,660 MYR (Rp28,669,435.20/bulan)
		Kedah	RM 32871.27	Rp141,310,456	Rp11,775,871	Emas 22K	Berdasarkan Estimasi Harga Emas dg Harga per gram RM386.7176471	7549 MYR (Rp32,496,331.28/bulan)
		Kelantan (2025)	29,376.00	Rp126,353,000	Rp10,529,417	Emas 18K	keterangan pegawai blm update nisab	6469 MYR (Rp27,847,233.68/bulan)
		Melaka	RM 40.092.42	Rp172,774,068	Rp14,397,839	Emas 24K	estimasi dibawah 18K atau sekitar 15-17K Harga Per Gram RM 417,6	8686 MYR (Rp37,390,797.92/bulan)
		Negeri Sembilan	RM. 33.880.36	Rp146,003,827	Rp12,166,986	Emas 22K	estimasi dibawah 18K atau sekitar 15-17K Harga Per Gram RM 398	5,591 MYR (Rp24,067,689.52/bulan)
		Pahang	RM 40,092.42	Rp172,480,798	Rp14,373,400	Emas 24K	estimasi 18K dengan harga RM 471.67	4,975 MYR (Rp21,415,982/bulan)
		Perak	RM 48,134.69	Rp207,079,287	Rp17,256,607	Emas 24K	Estimasi 22K dengan harga per gram RM 566.2	7,070 MYR (Rp30,434,370.40/bulan)
		Perlis	RM 38,871	Rp167,226,152	Rp13,935,513	Emas 24K	Estimasi dibawah 20K dengan harga per gram RM 457.3	4,950 MYR (Rp21,308,364/bulan)
		Pulau Pinang	RM 31,000	Rp132,529,936	Rp11,044,161	Emas 16K	16K Gold dengan harga RM371.49 per gram	7,386 MYR (Rp31,794,661.92/bulan)
		Selangor	RM 42,047	Rp180,889,558	Rp15,074,130	Emas 24K	Gold dengan harga RM 652 per gram	6,960 MYR (Rp29,960,851.20/bulan)
		Terengganu	RM36,217.86	Rp155,812,131	Rp12,984,344	Emas 24K	Estimasi 15-16K dengan harga RM 426.09 per gram	6,627 MYR (Rp28,527,379.44/bulan)
		Sabah	RM 36,979	Rp158,700,359	Rp13,225,029	Emas 24K	Estimasi 15-16K dengan harga RM 435.05 per gram	6,560 MYR (Rp28,238,963.20/bulan)
		Sarawak	RM 38654.73	Rp166,295,741	Rp13,857,978	Emas 24K	Estimasi 15-16K dengan harga RM454.76 per gram	6,420 MYR (Rp27,636,302.40/bulan)
		Kuala Lumpur	RM 29,740	Rp.127,808,700	Rp10,650,752	Emas 16K	Asumsi 15 - 16 K dengan harga RM 349,88 (mengacu ke harga lokal)	7,160 MYR (Rp30,821,795.20/bulan)

No	Negara	Negara Bagian	Nisab local currency	Setara berapa Rp/tahun	Setara berapa Rp/bulan	Estimasi Standar yang Digunakan	Keterangan Karatase	Avg Income (month)
		Putrajaya						RM10,769 (Rp46,357,529.68/bulan)
		Labuan						RM7,383 (Rp31,781,747.76/bulan)
3	Thailand 1 BTH = Rp540,89		BHT 247,171	Rp133,798,161	Rp11,149,846	Emas 16K	Gold bar price 96.5% per baht. BHT 5.58	BHT 16,000 / IDR 8,662,387 (Per month)
4	Brunei Darussalam 1 BND = Rp13.322,80		BND 8.157,45	Rp108,387,054	Rp9,032,254	Emas 16K	dengan ketentuan emas sebesar BND 95,97 per gram	BND 2,500 / IDR 33,217,198 (per month)
5	Vietnam 1 VND = Rp0,65		VND 355,679,270	Rp230,480,716	Rp19,206,726	Emas 24K	emas 24K sebesar VND 4.184.462 per gram	VND 8,300,000 / IDR 5,378,412 (Per month)
6	Filipina 1 ₱ = Rp290,14		₱ 802,765	Rp230,594,444	Rp19,216,203	Emas 24K	emas 24 karat sebesar ₱9,444.33 per gram	₱ 18,423 / IDR 5,292,008 (Per month)
7	Kamboja 1 KHR = Rp 4,17		KHR 30.811.754,90	Rp128,273,998	Rp10,689,500	Emas 16K	dengan ketentuan Gold (87.48 grams) = \$7644.002USD tertera pada sumber	3,621,500 KHR/Rp 15.112.955
8	Pakistan 1 PKR = Rp60,09		PKR 179,689	Rp10,817,655	Rp901,471	Perak		39,042.000 PKR / Rp 2,335,342
9	Sudan 1 SDG = Rp 28,00		8.321.884,20 SDG	Rp232,008,315	Rp19,334,026	Emas 24K		USD 763.09/ Rp12.809.240,37 (per year) Rp1.067.436,6 (per month)
10	Bangladesh 1 BDT = Rp 137,38		1.045.000 BDT (emas 21k) 83.500 BDT (perak)	Rp136.500.000 (emas 21k) Rp10.950.000 (perak)	Rp11.375.000 (emas 21k) Rp912.500 (perak)	Emas 21K dan perak	dengan ketentuan : The Nisab is applicable according to 21 Karat tertera pada sumber	USD 2960/ Rp49.668.800 (per year) Rp4.139.066 (per month)
11	Kuwait 1KWD=Rp54864.69		3.133,1 KWD	Rp171,963,321	Rp14,330,277	Emas 24K		USD 31.242/ Rp524.240.760 (per year) Rp43.686.730 (per month)
12	Mesir 1EGP = Rp358.9		581,910 EGP	Rp209,047,892	Rp17,420,658	Emas 24K		Rp5,140,471.82
13	Aljazair		867,000 DZD	Rp112,594,857	Rp9,382,905	Emas 18K		Rp19,446,329.13

No	Negara	Negara Bagian	Nisab local currency	Setara berapa Rp/tahun	Setara berapa Rp/bulan	Estimasi Standar yang Digunakan	Keterangan Karatase	Avg Income (month)
	1DZD = Rp129.74							
14	Afghanistan 1Af = Rp260.71		927,900 Af.	Rp237,792,009	Rp19,816,001	Emas 24K	Emas 24 karat dengan nishab sebesar 87.48 gram (10,607 Af.)	9083.54 Af. / IDR 2,370,873
15	Yaman 1 Rial=Rp70.56		Rial3,392,212	Rp239,219,478	Rp19,934,957	Emas 24K	Emas 24 karat dengan nishab sebesar 87.48 gram (Rial38,777)	Rial53,415 / IDR 3,769,525
16	Lebanon 1LBP=Rp0.19		LBP1,241,004,675	Rp232,513,998	Rp19,376,166	Emas 24K	Emas 24 karat dengan nishab sebesar 85 gram (L£14,622,402)	LBP 2,280,100 / IDR 428,505 (Krisis Ekonomi)
17	Maroko IMAD=Rp1.842,59		MAD14,667	Rp27,036,948	Rp2,253,079	Perak	Gold nisab: 85g (≈ MAD 126,440) Gold benchmark (precautionary) Silver nisab: 595g (≈ MAD 14,667) Silver benchmark (recommended for Morocco)	MAD 16,790 / IDR 30,920,674
18	Libya 1LYD=Rp2.674,90		LYD87,343	Rp232,975,499	Rp19,414,625	Emas 24K	The nisab for Zakat al-Mal from gold is 85 grams of pure 24-karat gold.	LYD 2,000 / IDR 65,356,687
19	India 1₹=Rp185,17		₹171458	Rp31,840,385	Rp2,653,365	Perak		₹21.103 = Rp4.000.000
20	Tunisia 1TND=Rp5.917,76		27002.976 TND	Rp157,635,160	Rp13,136,263	Emas 24K	ditetapkan mufti Republik Tunisia 26 Juni 2025 : Tunisia Dinar	850 TND = Rp4,700,000
21	Somalia 1SOS=Rp 29,45		SOS7,921,575	Rp233,483,444	Rp19,456,954	Emas 24K		\$150 = Rp2.523.960,00
22	Nigeria 1N=Rp 11.93		N17,210,000	Rp172,100,000	Rp14,341,667	Emas 24K	Estimasi Harga	₦339.000 = Rp3.390.000
23	Palestine 1₪=Rp5,480.58		₪40.000	Rp219,002,923	Rp18,250,244	Emas 24K		\$230 = Rp3.600.000
24	Afrika Selatan 1R=Rp 1,051.37		Gold Nisab : R210,590.90 Silver Nisab: R25,098.37	Rp222,695,244	Rp18,557,937	Emas 24K	87,48 gram emas atau 612,36 gram perak.	R14000 = Rp14.808.836,00
25	Indonesia		Rp91,440,096	Rp91,440,096	7,640,144	Emas 14K		6,9 juta/bulan

*) Warna hijau: Antara nisab perbulan dengan pendapatan rata rata perbulan, pendapatan di negara tersebut lebih tinggi daripada nisab per bulan. masyarakat di negara tersebut

memiliki kemampuan untuk membayar zakat yang sangat tinggi. akan terjadi kemaslahatan antara muzakki dan mustahik

**) Warna kuning: Antara nisab perbulan dan pendapatan rata rata perbulan, lebih tinggi nisab tetapi perbedaan tidak terlalu jauh. hal ini berarti masyarakat di negara tersebut masih memiliki kemampuan untuk menunaikan zakat secara massive.

***) Warna merah: antara nisab per bulan dengan pendapatan rata rata perbulan, jauh lebih tinggi nilai nisab per bulan. hal ini menjadikan penduduk di negara tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membayar/sedikit yang mampu membayar zakat dari penghasilan.

Sumber: diolah DKPN 2026

Praktik zakat pendapatan di berbagai negara menunjukkan bahwa penetapan nisab tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan fikih, tetapi juga oleh struktur ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat. Jika ditinjau berdasarkan Tabel 3. diatas, terlihat pola yang berbeda antara negara dengan tingkat pendapatan tinggi, menengah, dan rendah.

Pada kelompok negara dengan pendapatan tinggi seperti Singapura dan Kuwait, praktik zakat pendapatan umumnya menggunakan standar emas 24 karat sebagai acuan nishab, dengan nilai ambang batas yang relatif tinggi dalam mata uang lokal. Di negara negara ini, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi berbasis agama yang melengkapi sistem kesejahteraan yang telah mapan. Nilai nisab yang tinggi mencerminkan tingkat pendapatan per kapita yang juga tinggi, sehingga zakat cenderung bersifat selektif dan tidak menjadi satu satunya instrumen perlindungan sosial.

Pada kelompok negara berkembang berpendapatan menengah bawah, praktik zakat cenderung lebih beragam antara penggunaan emas murni dan perak. Negara seperti Sudan, Afghanistan, Yaman, Lebanon, Libya, Somalia, Nigeria, Palestina, dan Afrika Selatan menggunakan emas 24 karat sebagai standar utama. Beberapa negara seperti Pakistan, India, dan Maroko menggunakan standar perak sehingga nilai nisab jauh lebih rendah (sekitar Rp0,9–2,6 juta per bulan). Indonesia sendiri menggunakan standar emas moderat 14K dengan nisab sekitar Rp7,64 juta per bulan.

Secara keseluruhan, perbedaan standar karat dan penggunaan emas atau perak menunjukkan bahwa nisab zakat pendapatan bersifat kontekstual dan erat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi masyarakat. Di negara berpendapatan tinggi, nisab yang tinggi menjaga selektivitas muzakki sehingga zakat berperan sebagai instrumen redistribusi tambahan dalam sistem kesejahteraan yang telah mapan. Sebaliknya, di negara berpendapatan menengah dan bawah standar yang digunakan lebih fleksibilitas sehingga memungkinkan ambang nisab lebih selaras dengan daya beli masyarakat dan memperluas basis muzakki potensial. Variasi ini berdampak langsung pada estimasi jumlah muzakki, terutama di negara berpenduduk Muslim besar seperti Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Nigeria, dan Mesir, di mana perubahan kecil pada nilai nisab akibat fluktuasi harga logam mulia atau kebijakan karat dapat menggeser jutaan individu masuk atau keluar dari kategori wajib zakat. Dengan demikian, penetapan nisab dalam praktik kontemporer bukan sekadar isu fikih, melainkan juga instrumen kebijakan sosial yang mempengaruhi kapasitas penghimpunan zakat dan perannya dalam pengentasan kemiskinan.

Peningkatan kapasitas penghimpunan zakat sebagai implikasi dari kebijakan nisab yang tepat pada akhirnya berkonsekuensi langsung terhadap perluasan manfaat sosial. Semakin luas basis muzakki yang teridentifikasi dan semakin efektif sistem pengumpulan yang diterapkan, semakin besar pula dana zakat yang dapat dihimpun dan disalurkan secara tepat sasaran. Dampaknya tidak hanya pada peningkatan bantuan konsumtif untuk

pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga pada perluasan program produktif seperti pembiayaan usaha mikro, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, dan peningkatan akses pendidikan serta kesehatan. Dalam jangka panjang, kebijakan nisab yang responsif terhadap kondisi ekonomi nasional akan menentukan daya jangkau zakat dalam menurunkan tingkat kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.